



A.A. NAVIS

Alam Cerkembang Jadi Guru

ADAT DAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU

**Alam
Cerkembang
Jadi Guru**

ADAT DAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU

A.A. NAVIS

Alam Cerkembang Jadi Guru

ADAT DAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU

**ALAM TERKEMBANG JADI GURU
Adat dan Kebudayaan Minangkabau**

© A.A. Navis

No. 16/84

Pengantar: Dr. Taufik Abdullah

Pendesain Grafis & Kulit Muka: T. Ramadhan Bouqie

Penerbit PT Pustaka Grafitipers
Pusat Perdagangan Senen Blok II, Lantai III
Jakarta 10410
Anggota IKAPI

Cetakan Pertama 1984
Cetakan Kedua 1986

Percetakan PT Temprint, Jakarta

PENGANTAR PENERBIT

Adat Minang merupakan salah satu adat yang unik di Indonesia, antara lain karena sifat matrilineal yang ada pada masyarakat itu. Beberapa buku dan telaah tentang adat Minang telah diterbitkan, namun rasanya masih ada saja yang "tertinggal" tidak tersampaikan atau tercatat. Dan tidak jarang yang "tertinggal" itu ternyata penting, atau setidaknya menarik, untuk diketahui.

Dalam buku yang disusun A.A. Navis ini, hal-hal yang penting dan menarik tentang adat Minang itu banyak ditemukan. Di samping sebagai budayawan, Navis adalah seorang sastrawan; dan buku ini pun ditulis dengan gaya yang lancar dan berkadar informasi tinggi. Kami yakin, buku ini akan bisa menambah pengetahuan kita tentang adat Minang pada khususnya, dan kebudayaan Indonesia pada umumnya. Dan karangan Navis ini mungkin malah bisa menjadi salah satu buku baku tentang adat dan kebudayaan Minang.

Jakarta, Juli 1984

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	VII
"Studi Adat sebagai Pantulan Perubahan Sosial di Minangkabau" oleh Taufik Abdullah	IX
Pengantar Penulis	XXV
Sejarah	1
Tambo	45
Falsafah Alam	59
Undang-undang dan Hukum	85
Penghulu	119
Harta dan Pusaka	149
Rumah Gadang	171
Perkawinan	193
Kesusasteraan	229
Permainan Rakyat	263
Daftar Bacaan.....	285
Indeks	291

Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial di Minangkabau

Tentu saja soalnya terletak pada cara pendekatan. Kalau pendekatan saya dipakai, maka salah satu indikator untuk menentukan bahwa proses melemahnya kemantapan tradisional telah bermula ialah ketika peserta (*participant*) kebudayaan mulai secara kreatif mempersoalkan tuntutan dari dasar nilkulurnya. Kelanjutan proses itu akan makin jelas di saat mereka mencoba pula membuat jarak dengan dasar nilai kultural itu dan secara sadar mencoba menerangkan apa makna yang sesungguhnya dari dasar nilai itu. Dengan kata lain mereka bukan saja tidak membiarkan diri terlarut dan terkulai dalam keberlakuan dasar nilai kultural, tetapi bahkan juga ingin merangkul lebih keras. Mereka sebagai peserta makin sadar, bahwa nilai dasar yang dimiliki itu merupakan sesuatu yang berharga untuk selalu dipelihara. Dalam situasi seperti inilah biasanya patokan-patokan dasar nilai kultural tersebut diperjelas. Dengan begini dasar nilai itu di satu pihak secara rasional bisa dimengerti, dan di pihak lain ia dijadikan pula sebagai ukuran dalam menghadapi dan menjalankan perubahan. Sikap inilah biasanya disebut tradisionalisme — perubahan yang terjadi semestinya alah berlandaskan pada kelanjutan berlakunya tradisi.

Tentu bisa diduga bahwa tradisionalisme mengandung unsur-unsur konflik yang kadang-kadang juga tak terlalu mudah diatasi. Sampai dimanakah perubahan itu masih sah, tanpa mengorbankan keberlanjutan berlakunya nilai dasar tradisional. Sebaliknya revisi apakah yang harus dilakukan untuk meniadakan akibat negatif dari perubahan struktural, baik yang bersumber dari

dalam ataupun yang dipaksakan dari luar, yang tak terelakkan? Maka berbagai pasangan konflik pun bermunculan. Masyarakat yang sedang mengalami proses "detradisionalisasi" itu seakan-akan merupakan jaringan-konflik yang saling berkaitan. Namun jarang suatu konflik yang demikian sentral sehingga mengancam polarisasi sosial yang keras. Sebab konflik yang satu — antara dua golongan pendapat — bisa dilunakkan oleh konflik yang lain, ketika komposisi dari pro dan kontra telah berbeda. Jadi sesungguhnya kemajemukan konflik tersebut bukan saja bisa merupakan faktor pembendung proses disintegrasi sosial, tetapi juga sering menjadi unsur yang sangat menentukan bagi terjaganya integrasi. Karena itulah proses detradisionalisasi ini — suatu proses yang tentu saja tak terlepas dari perubahan sosial-ekonomis yang terjadi — bisa berlangsung lama. Seandainya suatu perubahan tanpa diinginkan terjadi, maka perubahan itu harus dilihat sedemikian rupa sehingga bukan saja secara kultural bisa dimengerti, tetapi juga pemasukannya ke dalam perbendaharaan kultural tidaklah merusak. Dengan ini *chaos* ingin dihindarkan dan dengan ini pula keberlakuan yang berlanjut dari nilai dasar tradisional ingin dipertahankan.

Tentu saja apa yang saya bicarakan di atas lebih merupakan suatu gejala intelektual. Kesemuanya lebih merupakan pergumulan para cendekiawan, para peserta kebudayaan yang paling sadar, untuk selalu ingin memberi makna terhadap dunia sendiri dan yang mengitari diri. Meskipun gagasan di atas memberi kesan bahwa saya ingin memberikan bentukan teoritis terhadap gejala yang dihadapi masyarakat tradisional ketika berhadapan dengan perubahan struktural yang terjadi, tetapi saya tidaklah bertolak dari pemikiran spekulatif. Hal-hal di atas berasal dari hasil observasi saya atas peristiwa sosial-kultural Sumatera Barat di awal abad 20 ini.

Tentu saja situasi itu tidaklah muncul begitu saja. Gerakan Padri yang kemudian meletus menjadi "perang saudara", yang terjadi di awal abad 19, telah memaksa masyarakat Minangkabau merevisi lagi definisi dari dunianya, dari "alam Minangkabau". Bagaimanakah hal-hal yang paradoksal dari dasar kultural harus secara kreatif diselesaikan? Pencarian definisi yang sesuai ini tidaklah sekadar usaha untuk menemukan dasar "ideologi" yang baru yang bisa selesai pada tingkat formalnya. Definisi baru tersebut langsung menyentuh hal-hal yang bersifat struktural. Meskipun pemurnian kehidupan keagamaan¹ merupakan tujuan utama gerakan Padri. hasil akhir yang ingin ditemukan ialah suatu "alam Minangkabau" yang baru, yang diredhai dan

¹ Mengenai aspek "pemurnian agama" dari gerakan Padri. lihat umpamanya H.A. Steyn Oarve, "Kaum Padari (Padri) di Padang Darat Pulau Sumatera" (terj.) dalam Taufik Abdullah (ed.) *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1979: 108-127. Lihat juga memoir Fakih Saghir, yang terkenal sebagai Syekh Jalaluddin, salah seorang ulama yang terlibat dalam konflik agama ini. Syekh

yang haq.

Saya tak tahu bagaiman jadinya Minangkabau jika Belanda tak campur tangan dalam Perang Padri ini. Tetapi sementara perang itu mengalami transformasi — dari pergolakan kultural menjadi perang kolonialisme — suatu definisi baru makin memperlihatkan dirinya. "Alam Minangkabau" tidak saja harus dianggap sebagai dunia yang berlandaskan adat dan Islam, tetapi hirarki dari keduanya telah pula diperjelas. Tidak lagi adat dan Islam yang paling mendukung, tetapi "adat bersandar syarah. Syarah bersandar Kitabullah." Selanjutnya dikatakan bahwa "agama mengata, adat memakai".² Maka sejak itu pemantulan struktural dari definisi kultural ini adalah merupakan salah satu tema pokok dalam sejarah Minangkabau. Dari sudut kekuasaan dan kewenangan, rumusan kultural ini mempertanyakan wibawa siapa yang harus lebih berfungsi dan kata siapa yang harus lebih memutus. Pemasukan unsur keulamaan ke dalam struktur kekuasaan, yang diwujudkan dalam keanggotaan di dalam *balai adat*, ternyata hanyalah merupakan pelebaran dari elite kekuasaan. Sedangkan esensi keulamaan tertinggal di luar. Keulamaan, yang bertolak dari penguasaan ilmu dan pengakuan sosial, tak bisa terlibat dalam proses pewarisan jabatan dengan memakai patokan matrilineal itu. Dari sudut sistem pewarisan masalahnya bahkan lebih pelik. Berbagai konflik yang terjadi makin memperlihatkan betapa "nikmatnya" hidup dalam kemajemukan hukum.³

Konflik terbuka kadang-kadang terjadi dan perdebatan terus berlanjut. Apalagi di samping itu masalah pemurnian (orthoksi) agama makin lama makin menonjol pula. Dalam hal ini yang dipermasalahkan tidaklah sekadar definisi "alam Minangkabau" tetapi sistem perilaku dan kebersihan keyakinan keagamaan dari noda-noda yang bisa mengurangi kemutlakan ke-Esa-an Allah. Betapapun fundamental dan mendasarnya hal-hal ini, kesemuanya berasumber dari dinamik kebudayaan sendiri. Masalahnya menjadi sangat berbeda ketika tantangan yang dihadapi bukan bertolak tiang-tiang "alam Minangkabau" sendiri. Soalnya menjadi lain sekali di saat tantangan yang datang itu

Djilal-eddin. *Verhaal van der aanvang der Padri onlusten op Sumatra* (diselenggarakan oleh Dr. J.J. Hollander). Leiden 1837. Ditulis dalam bahasa Melayu ("gaya" Minangkabau) huruf "Jawi", memoir ini pernah ditranskripsikan oleh M. Radjab untuk keperluan Seminar Kebudayaan Minangkabau 1970. Studi terhadap memoir ini dilakukan oleh Christine Dobbin, "Islamic Revivalism in Minangkabau at the Turn of the Nineteenth Century", *Modern Asian Studies*, 8.3 (1979): 319-356. Lihat juga M. Radjab, *Perang Padri*. Jakarta: Balai Pustaka, 1954.

2 Taufik Abdullah, "Adat and Islam": An Examination of Conflict in Minangkabau", *Indonesia*, 2 (October 1966): 1-24.

3 Mengenai hal ini telah cukup banyak studi yang dihasilkan. Yang terakhir dan paling lengkap ialah Franz von Benda-Beckman, *Property in Social Continuity*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1975. Tentang corak konflik di Minangkabau, lihat Nancy Tanner, "Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia", *Indonesia*, 8: 21-67.

berasal dari kekuasaan asing. Perang Padri ternyata tidak saja berakhir dengan didapatkannya suatu definisi baru tentang "alam Minangkabau", yang serta merta juga menuntut pemecahan dalam sistem sosial dan hukum, tetapi juga, dan lebih mudah dilihat dan dirasakan, bercokolnya dominasi politik dan meliter Belanda. Dengan dominasi corak hubungan yang bersifat atas-an-dan-bawahan pun makin pula memperlihatkan dirinya.⁴ Inilah suasana yang jelas dirasakan di awal abad 20.

Berhadapan dengan situasi baru ini, beberapa penghulu adat Minangkabau, para literati, yang tinggal di kota, berhadapan langsung dengan situasi dominasi ini, mulai secara bersungguh-sungguh merenung tentang hakikat "alam Minangkabau" dan tuntutan-tuntutan kultural yang terlekat di dalamnya. Dalam mempertentangkan tuntutan kultural ini dengan kesempatan yang terbuka dalam situasi baru yang dipaksakan dari luar itu, perenungan tersebut tidaklah dibiarkan untuk menjadi kontemplatif yang melarikan diri. Perenungan itu bahkan menjadi agenda untuk tindakan yang dilakukan. Maka berbagai kegiatan pun dijalankan. Sekolah kerajinan wanita didirikan, surat kabar (termasuk sebuah surat kabar wanita) diterbitkan, dan studi-studi-fonds digerakkan. Pada waktu itu barangkali tak ada kata yang lebih populer daripada "kemajuan", demi mencapai "dunia maju". Bukankah Minangkabau masyarakat matrilineal? Kalau begitu, mestinya wanita bersekolah. Bukankah tuntutan bagi putra Minangkabau untuk "meninggikan semarak Gunung Merapi?" Sebab itu mengapa tidak terjun dalam perlombaan untuk mendapatkan "kemajuan"? Begitu kata ajaran adat, demikian pula *tambo* melukiskan dan bahkan *kaba* telah memberi contoh bagaimana jadinya jika ketentuan itu diingkari. Sementara itu dari pihak lain, yang bertolak dari tiang "alam Minangkabau" yang satu lagi, Islam, bukan saja menginginkan berlanjutnya pemurnian dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga menjadikan agama sebagai dasar yang kokoh bagi "kemajuan". Dalam suasana yang tampaknya serba optimis ini, konflik tak terelakkan. Kemajuan? Tetapi sampai di mana? Kemajuan barulah benar dan dibenarkan jika ia sadar akan batas antara "haram" dan "halal", antara *haq* dan *bathil*.⁵ Belum lagi jika dipertimbangkan pula reaksi mereka yang menentang peralihan dari tata cara "nenek moyang kita". Maka bukan saja perdebatan yang terjadi, segala makian pun diobral — setidaknya demikianlah yang terpantul dalam tulisan-tulisan di surat-surat

⁴ Tentang "pemecahan kultural" terhadap masalah politik yang tak teratas ini, lihat Taufik Abdullah, "The Making of the schakel society" dalam *Conference on Modern Indonesian History* (July 18-19, 1975). Madison: Center of Southeast Asian History, University of Wisconsin, 13-25. Dimuat juga dalam *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, VI, 3 (Agustus 1976): 13-30.

⁵ Situasi, digambarkan dalam Taufik Abdullah "Modernization in the Minangkabau world: West Sumatra in the Early Decades of the 20th Century" dalam Claire Holt et.a. (eds.), *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca. London: Cornell University Press, 1972, 179-245.

kabar.

Dari situasi kompleks yang selintas terlukis di atas, saya memang ingin mengatakan bahwa perenungan yang kreatif terhadap tradisi bukan saja menghasilkan agenda tindakan, tetapi juga kontrol sampai di mana perubahan itu harus berjalan. Dorongan dan sekaligus pembatasan yang diberikan tradisi menghasilkan suasana intelektual dan sosial yang tak selalu menenteramkan. Dalam suasana inilah pendidikan Barat, ataupun Islam "modern" berkembang cukup pesat di Minangkabau. Suasana ini bukan saja menyebabkan dimulainya tradisi merantau yang baru, yaitu menuntut ilmu modern ke Jawa, atau bahkan ke Negeri Belanda, tetapi juga, menurut statistik pemerintah Hindia Belanda, menjadikan Minangkabau sebagai "daerah Islam" yang paling berpendidikan. Namun suasana ini juga yang melatar belakangi berbagai kegiatan politik, mulai dari pemberontakan-pemberontakan kecil (1908) dan yang dibesar-besarkan dengan sebutan pemberontakan komunis di Silungkang (1927), sampai dengan aktivitas partai-partai radikal di tahun 1930-an.

Dari sudut sejarah intelektual, maka ada dua aspek yang segera tampil di hadapan saya. Pertama, di samping merupakan kancan perdebatan tentang bagaimanakah bentuk dan corak "kemajuan" yang baik itu, suasana yang diuraikan di atas memberikan pula bentuk literer dari perdebatan itu sendiri. Saya kira "sastra protes" yang dilahirkan para terpelajar Minangkabau, yang biasa pula dianggap sebagai pelopor sastra Indonesia modern, bisa dikembalikan kepada suasana sosial-kultural yang terjadi sejak awal abad ini.⁶ Bukankah tragedi yang banyak dilukiskan itu berkisar pada ketidaksediaan untuk menerima akibat logis dari sikap yang telah terbuka terhadap "dunia maju"? Merantau lah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, tetapi sadarlah bahwa ninik-mamaklah yang memungkinkan itu semua, dan pada ninik-mamak pulalah kepatuhan harus diberikan. Ke rantau hanya selama "di rumah berguna belum". Rantau hanyalah peralihan sementara, begitu secara fisik, demikian pula dalam panggilan kultural. Dan bagi saya, salah satu ketinggian nilai *Salah Asuhan* dari Abdul Muis sebagai dokumen sosial, ialah kemampuannya melukiskan tragedi keterombang-ambingan "dorongan" dan "hambatan" dari tradisi. Tetapi baiklah hal ini saya pulangkah saja pada berbagai studi sastra yang telah dijalankan dan pada ahli serta kritikus sastra.⁷ Hal yang kedua lah, pada

⁶ Tentang literatur itu sendiri, lihat antara lain A. Teeuw, *Modern Indonesian Literature*, Vol. 1. Tentang kemungkinan hubungan suasana sosial dengan salah satu novel, Siti Nurbaja, telah saya bicarakan dalam komentar singkat saya terhadap tulisan Harry Aveling ("Siti Nurbaja": Some reconsiderations"), *Bijdragen*, 126, 2 (1970): 242-248.

⁷ *Salah Asuhan* adalah satu novel Indonesia yang paling banyak dijadikan sasaran studi khusus. Antara lain, David de Queljoe, *Marginal Man in a Colonial Society: Abdcel Moeis' "Salah Asuhan"*. Athens, Ohio: Ohio University Center for Romantic Tradition in the Early Indonesian Novel, *Modern Asian Studies*, Vol. 2 (April 1973): 179-192.

kesempatan ini, yang lebih menarik perhatian saya.

Aspek yang kedua ialah berlanjutnya usaha untuk mengerti konsep ideal atau nilai-nilai dasar yang diberikan tradisi. Hal ini juga diteruskan dengan usaha untuk menerangkannya dengan secara rasional. Simbol-simbol yang sering terpantul dalam *tambo* ditafsirkan sehingga bisa sesuatu yang lebih *plausible*, yang kemungkinan kesejarahannya diperkirakan bisa masuk akal. Legenda dan mithos tidak hanya dibiarkan berbicara melalui simbol-simbol kultural yang telah berakar, tetapi dijadikan eksplisit. Misteri ingin dihilangkan, bukan dengan memperlihatkan realitas yang telah diselimutinya, tetapi, terutama, mencari moral yang mendasarinya. Begitu sejak awal abad XX, ketika tradisi mulai direnungkan, sampai kini, berbagai buku telah ditulis, sekian perdebatan telah dilakukan, dan entah berapa pula pertemuan ilmiah ataupun "setengah ilmiah" yang telah dijalankan. Kesemuanya memperlihatkan usaha mengerti dan menerungkan lagi dasar-dasar konseptual dari "alam Minangkabau".

Karena kecenderungan intelektual ini cukup penting untuk mengerti masyarakat dan kebudayaan Minangkabau, barangkali tak ada salahnya saya memberikan berbagai ilustrasi. Ketika Sekolah Raja (*Kweekschool*) di Bukittinggi merayakan lustrumnya di awal abad ini, maka murid-muridnya mengadakan pertunjukan sandiwara, yang konon sangat memuaskan para hadirin. Mereka mementaskan bagian-bagian yang paling menarik dari *Kaba Cindua Mato*.⁸ Sukses ini diulang lagi oleh berbagai sekolah dan organisasi pemuda, seperti Jong Sumatranen Bond, di dalam ataupun di luar Sumatera Barat. Bahkan Abdul Muis ketika masih asyik dalam Sarekat Islam, pernah pula menulis drama dari *kaba* ini. Di samping *Cindua Mato*, ternyata yang paling populer di kalangan pelajar, selama dasawarsa kedua sampai dengan keempat dari abad ini, ialah *Kaba Sabai Nan Aluih*. Konon, menurut cerita orang tua-tua, di awal tahun 1920-an, si penyair-politikus, Rustam Effendy, pernah menjadi "bintang pentas" dari *kaba* ini di Sumatera Barat. Drama yang berbahasa Indonesia dari *kaba* ini pernah ditulis oleh A.K. Gani, mahasiswa kedokteran, yang pernah main film, kemudian aktif dalam Gerindo, partai nasionalis yang radikal.

Tetapi apa artinya ini semua? Abdul Muis mungkin bisa memberi jawaban. Ia mengatakan, drama *Cindua Mato* sengaja ditulisnya agar kaum terpelajar menyadari bahwa kehidupan demokrasi telah berurat-berakar dalam kebutuhan kita. Jadi tidaklah terlalu mengherankan jika alasan yang sama dipakai pula oleh Datuk Sutan Maharadja ("Bapak Jurnalistik Melayu," kata Van

⁸ Berbagai edisi dari *kaba* ini diterbitkan. Edisi terakhir, yang belum selesai, ditulis oleh M.R. Manggis Datuk Radjo Panghoeloe, *Cindua Mato*. Bukittinggi: Pustaka Saadiah, 1973(?). Studi anthropologis pendek tentang *kaba* ini telah ditulis oleh Taufik Abdullah, "Some Notes on the *Kaba Tjindua Mato*: An Example of Minangkabau Traditional Literature", *Indonesia*, 9 (April 1970): 1-22.

Ronkel)⁹ ketika ia, sebagai penghulu adat yang berasal dari *Luhak Nan Tiga*, mengadakan "revolusi adat" di Padang, di awal abad ini. Dengan "revolusi" ini ia dan kawan-kawannya dari pedalaman (dari *darek*, istilahnya) menantang Tuanku Regen dan para bangsawan Padang, yang dikatakan telah mengikuti adat-Aceh, yang mengenal hirarki kebangsawanahan. Jadi tak "demokratis". Dan artinya juga tak "modern" dan bukan pula "Minangkabau".¹⁰

Dan sudut inilah barangkali usaha memperkenalkan dan mempopulerkan *kaba* dan *tambo* bisa pula dilihat. Mungkin benar pula anggapan yang mengatakan bahwa *Kaba Sabai Nan Aluih* tidaklah sesuai dengan struktur masyarakat Minangkabau. Tetapi masalahnya bukan pada *plot* dan juga bukan pula pada wadah sosial dalam mana *plot* itu bermain yang lebih penting, tetapi pada pesan moral yang ingin disampaikan. Maka apa yang lebih sesuai daripada kisah si *Sabai*, yang lemah-lembut, tetapi tegas – "semut terinjak tak mati, alu bertarung patah tiga" – untuk menekankan pentingnya harga diri? Dan bukanlah hal yang aneh jika *kaba* ini sangat populer di kalangan terpelajar di saat perdebatan dengan "kaum kuno" sedang menjadi-jadi.

Peneguhan moral tradisional dalam menghadapi dan menjalani perubahan "demi kemajuan", adalah salah satu corak dari kecenderungan intelektual yang telah saya singgung di atas. Dalam hal ini pulalah penciptaan *Kaba Rancak di Labueh* bisa dilihat.¹¹ *Kaba* bersajak karangan Datuk Paduko Alam (ahli adat yang sangat terkemuka dari Payakumbuh) ini, bukan saja contoh dari puisi indah yang dihasilkan oleh kebudayaan yang rhetoris, seperti Minangkabau, tetapi juga adalah *expose* dari ajaran moral Minangkabau menghadapi zaman peralihan. Dan dalam hal ini Datuk Paduko Alam tidaklah sendirian. Mungkin terasa berlebih-lebihan, tetapi kalau diperhatikan, 'sastra protes', yang entah karena apa sering disebut antiadat itu, sering sekali memakai moral lama sebagai alat perlawanan kesewenang-wenangan wibawa dan kekuasaan adat atau orang tua. Jadi 'sastra protes' itu lebih merupakan suatu tuntutan terhadap sistem perilaku daripada gugatan terhadap struktur dan dasar moralnya.

Penerbitan buku-buku dan tulisan tentang adat dan *tambo* dan kadang-kadang diikuti dengan penekanan akan keberlakuan dalam zaman sekarang adalah corak kedua. Dengan dasar inilah antara lain Datuk Sutan Maharadja¹² menerbitkan surat kabar *Oetoesan Melajoe* (1913-1922), Soenting

⁹ Ph.S. Van Ronkel, *Rapport Betreffende de Godsdienstige Verschijnselen ter Sumatra's Westkust*. Batavia: Landsdrukkerij, 1916.

¹⁰ B. Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*. Jakarta: Bhratara, terjemahan dari "Bijdrage tot de Bibliographie van thuidige Godsdienstige beweging ter Sumatra's Westkust", *Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap*, 59 (1920): 249-325.

¹¹ A. Johns telah menerjemahkan dengan indah *kaba* ini ke dalam bahasa Inggris. A. Johns, *The Kaba Rantjak Dilabuan: A Specimen of Traditional Literature of Central Sumatra*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1958.

¹² Lihat Taufik Abdullah "Modernization".

Melajoe (1915), surat kabar wanita yang "resminya" dipimpin oleh putrinya, Ratna Djoewita, dan Rohana Kudus ("Kartini dari Sumatra").¹³ Dalam kedua surat kabar tersebut Datuk ini dan kawan-kawannya tak henti-hentinya menggauli adat Minangkabau, sebagai pola ideal untuk bertindak dan memperlihatkan "keagungannya" dalam menghadapi zaman baru. Dalam surat kabar *Oetoesan Melajoe* diskusi adat diadakan antara para ahli adat. Dalam surat kabar ini pula Datuk Sutan Maharadjo, menyerang para terpelajar Barat yang telah melepaskan "pusaka nenek moyang kita", Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katemanggungan (perumus legendaris dari adat Minangkabau).

Datuk Sutan Maharadjo, pendiri pertama dari partai-adat, adalah pula pelopor dalam usaha memperkenalkan norma adat dan *tambo* alam Minangkabau kepada masyarakat, yang makin mengenal tulis-baca. Hal ini pulalah yang dilakukan oleh Datuk Sanggoeno Diradjo. Otoritasnya dalam hukum adat cukup diakui sehingga bukunya dipakai oleh Schrieke sebagai pegangan dalam menguraikan masyarakat Minangkabau yang sedang dilanda krisis akibat peralihan sosial-ekonomis.¹⁴

Dengan gaya yang berbeda dan temperamen yang tak pula sama serta corak aktivitas juga berlainan, saya kira Datuk Sutan Maharadjo dari Sulit Air, Datuk Paduko Alam dari Payakumbuh, dan Datuk Sanggoeno Diradjo dari Sungayang (Batusangkar), adalah tiga dari tokoh literati Minangkabau yang paling kreatif pada perempat pertama dari abad ini. Setidaknya mereka lah yang mempelopori dalam usaha perumusan moral, ajaran, dan hukum adat Minangkabau dengan memakai media modern dan dengan sadar pula mengarahkan pembicaraan mereka yang sedang mengalami proses urbanisme. Dengan begitu mereka, terutama Datuk Sutan Maharadjo, yang tak pernah sempat menyelesaikan satu pun buku yang lengkap, dan Datuk Sanggoeno Diradjo, yang menulis beberapa buku,¹⁵ meletakkan dasar bagi penulisan adat Minangkabau yang "modern". Tetapi kecenderungan yang sangat keras Datuk Sutan Maharadja untuk menandakan identifikasi adat dengan ajaran tharekat (antara lain Martabat Tujuh) serta kecurigaannya terhadap segala pikiran dan perubahan yang dianggapnya telah menodai "adat yang sesungguhnya", menyebabkan ia terlibat dalam perdebatan yang tak henti dengan golongan Kaum Muda, yaitu para reformis Islam dan pemuda terpelajar Barat. Usaha Datuk Sanggoeno

13 Tentang Rohana Kudus sebagai pelopor gerakan wanita di Sumatera Barat, lihat Tamar Djaja, *Rohana Kudus: Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Penerbit Mutiara, 1980. Ia adalah kakak tertua dari Sultan Sjahrir.

14 B. Schrieke, "The Causes and Effects of Communism on the West Coast Sumatra", dalam *Indonesian Sociological Studies*. The Hague/Bandung: W. van Hoeve, 1955. Part One.

15 Buku-buku Datuk Sanggoeno Diradjo antara lain:

1. *Tjerai Paparan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*. Fort de Kock, 19..
2. *Kitab Perjatoeran Adat Lembaga Alam Minangkabau*, 2 jilid. Fort de Kock, 1923.
3. *Moestiko Adat Alam Minangkabau* (Djakarta: Balai Pustaka, 1953).

Diradjo untuk memperkenalkan kategorisasi baru tentang adat dan "menghilangkan" misteri dari *tambo*, sehingga diharap agar lebih merupakan suatu "sejarah", serta merta mendapat tanggapan yang keras dari Abdul Karim Amaroellah Al danawi (Dr. Syekh A. Karim Amarullah, ayah almarhum Buya Hamka). Ulama ini menentang kategori-kategori adat yang dikemukakan oleh Datuk Sanggoeno Diradjo, yang menurut pikirannya seakan-akan melupakan proses Islamisasi yang berkelanjutan dalam dunia pemikiran adat. Ia juga mengejek usaha "rekonstruksi" sejarah dari *tambo*, yang dirasakannya bukan saja salah dari sudut "kenyataan historis", tetapi juga tak benar dari sudut logika.¹⁶

Masa awal dari usaha peneguhan adat di saat perubahan sosial, yang dirasakan telah memperlihatkan akibatnya, memang dipenuhi oleh perdebatan. Masalahnya bukan saja sekadar untuk mempertahankan "adat lama, pusaka usang", tetapi juga menemukan moral tradisi yang lebih sesuai. Ketika berbagai ketentuan hukum adat sudah tak lagi berlaku — "*dahulu adat nan bapakai, kini rodi nan paguno*" — dan di saat pranata kekuasaan adat telah makin tak berarti, maka keinginan untuk merangkul adat, sebagai simbol dari ke-Minangkabau-an, makin mendesak. Dalam usaha ini pluralisasi sosial yang telah bermula sebagai akibat langsung dari dominasi politik dan ekonomi Belanda, juga menimbulkan dirinya. Inilah salah satu faktor terjadinya perdebatan tersebut. Jadi yang dihadapi para pendukung adat bukanlah sekadar situasi kultural yang makin berubah, tetapi juga telah adanya kelompok-kelompok sosial tertentu — yang memang masih sangat kecil — yang menyangkan keabsyahan mereka sebagai perumus adat yang sesungguhnya. Apa yang harus mereka lakukan tidak sekadar perekaman kembali dasar-dasar ideal adat dan perumusannya yang lebih sistematis, tetapi juga proses ideologisasi adat. Dengan begini sistematasi dari nilai-nilai dan norma-norma adat makin disempurnakan dan peranan adat Minangkabau sebagai kerangka konseptual makin diperkuat. Bukanlah apa yang sesungguhnya terjadi yang harus dikemukakan, tetapi apa yang "semestinya harus begitu" yang mesti ditegaskan.

"Adat hanyalah selingkung aur," kata pepatah. Maksudnya, dalam realitas hidup sehari-hari setiap nagari mempunyai adat dan kebiasaannya yang

¹⁶ Abdul Karim Amrullah Al danawi. *Kitab Pertimbangan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*. 2 jilid, Fort de Kock: Snelpersdrukkerij "Agama", 1921. Buku ini adalah kritik terhadap tulisan Datuk Sanggoeno Diradjo. *Tjerai Paparan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*. Atas kritik ini Datuk Sanggoeno Diradjo membals dengan buku baru, *Kitab Perjatoetan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*, 1923. Di samping itu Datuk ini mengadukan ke pengadilan AbdulkarimaliasH. Rasul dengan tuduhan plagiat. Soalnya ialah sebelum mendebat apa yang dikatakan oleh Datuk Sanggoeno Diradjo. H. Rasul lebih dulu menyalin secara-utuh paragraf-paragraf yang ingin didebatnya — tanpa izin pengarang dan penerbit. Tentang kasus ini lihat HAMKA. Djakarta: Djajamurni, 1962.

bah banyak para penulis buku-buku adat, terutama yang memakai *tambo* sebagai ancang-ancang penulisannya, untuk mempergunakan informasi (yang memang tak terlalu mendalam) dari hasil penemuan sarjana-sarjana asing. "Maharadja Alif", yang konon raja Minangkabau di abad 17, mulai dikenal, sebagai pengaruh laporan von Bazel dari abad ke 18, yang dimuat dalam *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*.¹⁹ Demikian juga halnya dengan nama Adityawarman, pangeran dari Majapahit yang menjadi raja di Minangkabau di abad ke 14.²⁰ Di samping itu peristiwa-peristiwa historis yang terjadi sejak Perang Padri mulai pula dipertimbangkan. Dari sudut hukum adat, sebagian dari buku-buku tersebut secara populer mengutip pula pendapat atau klasifikasi yang diperkenalkan oleh ahli hukum adat, van Vollenhoven, dan sebagainya.

Dalam kelompok yang ingin lebih mengilmiahkan penulisan tentang adat Minangkabau ini bisa disebut antara lain Datuk Batuah Sango, Aman Datuk Madjo Indo, Datuk Maruhum Batuah dan Bagindo Tanameh, M. Rasjid Manggis Datuk Radjo Panghoeloe, Darwis Thaib, dan Idrus Hakimi Datuk Radjo Penghoeloe.²¹ Bertolak dari keinginan untuk lebih memperkenalkan Minangkabau dengan berbagai aspek adat dan kebudayaannya, buku-buku yang ditulis para ahli ini juga beranjak dari pemikiran yang "Minangkabau-sentris". Dengan arti bahwa penulisan beranjak dari asumsi dasar akan keabsahan tradisi dan alam pikiran Minangkabau. Jadi para penulis itu, seperti para pendahulunya, adalah juga para *literati*. Justru dalam hal inilah sifat kreatif mereka kelihatan. Bagaimanakah harus diselesaikan penemuan ilmiah Barat dengan tradisi sejarah, *tambo*? Bukan methodologi dalam penyesuaian yang penting, tetapi keutuhan gambaran tradisi yang harus tetap terjaga. Dengan begini buku-buku tersebut sangat berharga sebagai gambaran dari pemikiran

19 Terapi berdasarkan rekonstruksi teoretis "kerajaan Minangkabau", validitas sejarah dari kehadiran "Maharaja Alif" atau "Rajo Alief" ini agak disangskakan juga, lihat P.E. de Josselin de Jong, *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-political Structure in Indonesia*. Djakarta: Bhratara, 1960 (reprint): 103-104.

20 Pitono Hardjowardjojo, *Adityawarman*. Jakarta: Bhratara, 1968.

21 Datuk Batuah Sango, *Tambo Minangkabau*. Payakumbuh: Pertjetakan Limbago. M. Datuk Maruhum Batuah dan Datuk Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Djakarta: N.V. Poesaka Aseli (n.d.).

M. Rasjid Manggis Datuk Radjo Panghoeloe, *Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Padang: Sri Dharmo, 1971.

Ahmad Datuk Batuah dan A. Datuk Madjoindo, *Tambo Minangkabau*. Djakarta: Balai Pustaka, 1956.

Bahar Datuk Nagari Basa, *Tambo Silsilah Adat Minangkabau*. Payakumbuh: C.V. Elonora, 1966.

Darwis Thaib Datuk Sidi Bandaro, *Seluk Beluk Adat Minangkabau*. Bukittinggi: N.V. Nusantara, 1967.

Idrus Hakimi Datuk Radjo Penghulu adalah penulis adat yang paling produktif saat ini. Mungkin kedudukannya sebagai "pemelihara adat" dan Lembaga Kerapat Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mengharuskannya harus selalu tampil sebagai pembela norma dan nilai-nilai adat. Buku-bukunya antara lain:

— *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*. Padang: LKAAM, 1978.

— *Rangkaian Mutiara Mestika Adat di Minangkabau*. Padang: LKAAM, 1973.

berbeda-beda. Tetapi realitas bisa menjaga diri sendiri. Yang penting ialah bagaimana adat sebagai kerangka konseptual, bukan sebagai aktualitas, harus dirumuskan. Demikianlah umpamanya, pada tahun 1875 hak penghulu dan balai adat untuk mengadili masalah pidana dihapuskan oleh pemerintah kolonial.¹⁷ Tetapi kenyataan itu tidaklah mengurangi keharusan untuk mengetahui dan mendalami prinsip-prinsip hukum pidana dalam adat Minangkabau. Bukanlah keberlakuan yang teramat penting, tetapi cara adat untuk memelihara dan menyelesaikan berbagai bentuk perbuatan yang mengganggu ketenteraman sosial. Jika seandainya perbuatan itu lebih menyangkut malu keluarga ataupun nagari, bukankah ketentuan adat yang lebih bersifat redemptif itu akan lebih bisa berfungsi? Karena itulah ketentuan-ketentuan ini selalu diulang, selalu diucapkan, selalu dikenang.

Jika penerbitan buku-buku adat biasa dipakai ukuran, saya kira sejak awal 1930-an kecenderungan ideologisasi adat telah mulai berkurang. Kegiatan partai-partai adat tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, sedangkan di kalangan penghulu telah makin banyak juga yang melibatkan diri dalam berbagai kegiatan. Perubahan sosial-ekonomi yang terjadi makin tak memungkinkan para penghulu untuk hanya menggantungkan diri pada "anak buah". Sedangkan sementara itu kesadaran bahwa Minangkabau adalah suatu keutuhan yang tunggal telah pula dikoyak-koyak. Bukan saja Islam, yang menjadi dasar yang paling fundamental dari Perminangkabauan tak bisa terlepas dari sifat citanya yang universal, tetapi juga pergerakan nasionalisme yang melanda Minangkabau sejak pertengahan tahun 1920-an, telah pula menandingi kesatuan administratif dari pemerintahan kolonial. Bahkan sampai dengan pertengahan tahun 1930-an Sumatera Barat merupakan salah satu pusat pergerakan politik kebangsaan yang radikal. Di saat ini nagari-nagari, yang secara formal tetap berada di bawah pemerintahan para penghulu dengan balai adat mereka, dimasuki oleh partai dan organisasi sukarela. Apa yang terjadi, bila berbagai laporan penjabat pemerintah bisa dipakai, ialah bermulanya "negara dalam negara". Maksudnya wibawa dan kekuasaan para penghulu adat telah disaingi oleh tokoh-tokoh partai dan organisasi.¹⁸

Dalam suasana seperti ini, tidaklah terlalu mengherankan bahwa salah satu corak yang paling menonjol dari penulisan tentang adat Minangkabau ialah makin naiknya kecenderungan informatif dan berkurangnya sifat ideologis. Sifat argumentatif makin berkurang dan kedudukan Islam atau Kitabullah sebagai dasar segala-galanya makin diperkuat. Yang menarik juga ialah bertam-

17 Tentang hal ini lihat Ph.S. Van Ronkel, "De invoering van ons Strafwetboek ter SWK naar aanteekeningen in een Maleische Handschrift", TBB, 46 (1914): 249-255.

18 Lihat Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra*. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1971.

literati Minangkabau tentang masyarakat dan zaman lampau. Mereka memberi informasi dan, tanpa harus bersifat defensif, memperlihatkan keberlanjutan validitas dari nilai dan norma dari "alam Minangkabau".

Khusus mengenai hal yang belakangan ini barangkali buku yang ditulis oleh Prof. Nasrun bisa dianggap salah satu puncak dari dalam tradisi penulisan Minangkabau modern.²² Dalam bukunya Prof. Nasrun dengan sistematis dan menarik mencoba menghidupkan kembali "kebesaran" nilai filosofis yang inheren dalam ajaran adat Minangkabau. Ia memang tidak mempunyai orisinalitas seperti Datuk Paduko Alam, si penulis *Rancak Dilabuah*, atau Datuk Sutan Maharadjo, tetapi dengan menempatkan dirinya sebagai "perantara" — antara kebijaksanaan adat yang telah dirumuskan dengan para pembaca — Prof. Nasrun, seorang ahli hukum tatanegara, berhasil dengan baik membuat interpretasi tentang ajaran adat. Dan untuk ini ia pun mengadakan pula semacam studi perbandingan.

Hal-hal yang telah saya bicarakan di atas adalah sekadar cuplikan selintas dari sejarah pemikiran Minangkabau tentang dirinya, tentang dunianya. Tentu saja di samping mereka yang ingin memperlihatkan keberlanjutan nilai Minangkabau, bukan tak terdapat pula yang menyangsikannya. Salah satu tulisan yang pernah menghebohkan, ialah buku kecil Hamka yang berjudul *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Ditulis di tahun 1946,²³ sudah bisa diduga bahwa buku ini lebih merangsang semangat revolusioner, daripada mempertanyakan nilai dasar keminangkabuan. Buku ini lebih mengecam struktur kekuasaan adat, yang pernah dibina oleh pemerintah kolonial, dan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tak lagi sesuai dengan "zaman perjuangan". Mungkin terasa agak berlebih-lebihan, tetapi buku ini lebih membayangkan hubungan "cinta" dan "benci" yang kadang-kadang sangat aneh, antara "perantau" dengan negeri kelahiran. Kritik terhadap struktur dan nilai adat lebih banyak muncul dalam obrolan di warung atau lapau, yang kadang-kadang berfungsi sebagai "balai rendah", pembanding semua tata dan norma yang dibelai-belai oleh "balai adat", tempat para ninik-mamak bermusyawarah. Meskipun hal-hal ini tak dapat digeneralisasi begitu saja, namun dapatlah dikatakan, sejak Syekh Achmad Chatib melancarkan serangan yang paling mendasar atas sistem pewarisan matrilineal Minangkabau di akhir abad 19, kritik-kritik terhadap adat Minangkabau tidak lagi bersifat fundamental. Bu-

22 Prof. M. Nasrun, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Djakarta: Bulan Bintang, 1927.

23 Diterbitkan di Padang Panjang. Seberapa jauh HAMKA "konsisten" dengan serangannya, lihat antara lain tulisannya dalam Mochtar Naim (ed.), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris*. Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968.

Umur yang menua dan berakhirknya "situasi revolusioner" tampaknya sangat berpengaruh bagi perubahan sikap ini.

kan saja sifatnya fragmentaris, tetapi juga lebih merupakan titik terhadap sistem perilaku, yang diberi dasar adat, dan "keterbelakangan" dari para penghulu. Jika dibanding dengan periode ketika para *ideoloque* adat masih bersuara lantang, maka tulisan-tulisan yang menyangsikan keberlakuan norma dan nilai adat telah jauh lebih berkurang. Barangkali kenyataan bahwa struktur kekuasaan telah makin tak berdaya, antara lain karena tiada lagi kekuasaan kolonial yang akan menahan erosi wibawa dan kekuasaan penghulu akibat perubahan sosial-ekonomis. Di samping itu, kesadaran akan makin tumbuhnya "komunitas nasional" dalam pengertian kultural, adalah pula salah satu faktor yang menentukan. Komunitas nasional yang berada dalam proses menumbuhkan identitas nasional menyebabkan unsur-unsur pendukungnya makin sadar untuk menjaga dasar esensial mereka. Tentu perlu pula dicatat bahwa hal ini juga didorong oleh pemerintah dalam berbagai kegiatan kebudayaan.

Mungkin dalam situasi ini pula berbagai seminar yang bertaraf nasional untuk mempelajari adat dan kebudayaan Minangkabau diadakan. Kegiatan-kegiatan ini mencapai puncaknya di tahun 1970. Ketika itu seminar besar tentang kebudayaan Minangkabau diadakan di Batusangkar, dekat Pagaruyung, yang konon merupakan pusat "kerajaan Minangkabau dahulu kala".

Dari uraian di atas barangkali satu hal yang menyolok bisa kelihatan, penulisan tentang adat dan kebudayaan Minangkabau, baik yang ditulis oleh para ahli adat ataupun yang ingin mengecam keberlakuan adat, bertolak dari sikap bahwa apa yang ditulis itu haruslah fungsional. Ia tak berhenti pada keinginan untuk memberitakan dan memberi penjelasan, tetapi lebih penting lagi untuk dipakai sebagai pedoman dan sistem perilaku. Karena itulah kecenderungan "Minangkabau-sentrism" kelihatan jelas sekali. Karena itu bisa pula dimengerti terjadinya peralihan dalam sikap terhadap bagaimana ketentuan dan norma serta nilai adat itu harus dikemukakan. Hal-hal inilah yang menyebabkan mengapa tulisan-tulisan, yang disebut sepintas lalu di atas, tetap penting, baik sebagai bahan studi, maupun sebagai penambah pengetahuan dan pelajaran. Daripadanya kelihatan tidak sekadar "adat lama, pusaka usang", tetapi dinamik kesejarahan Minangkabau sendiri.

Studi tentang kebudayaan dan masyarakat sebagai sesuatu yang harus berfungsi dalam kehidupan sosial dan pribadi adalah salah satu ciri utama dari penulisan yang dilakukan oleh *participant* atau peserta kebudayaan. Studi atau penulisan itu tidaklah habis pada dirinya, tetapi berusaha mencari kelanjutan *relevancy* dari tradisi dalam proses peralihan sosial. Hal inilah terutama yang membedakannya dengan studi yang dilakukan oleh para peninjau, *observers*, atau mereka yang sadar menjadikan dirinya sebagai peninjau. Semacam jarak antara *actor* atau pelaku kebudayaan dengan peninjau secara methodologis dengan tegas diadakan. Yang ditinjau dan yang meninjau seakan-akan berada

dalam situasi yang saling berhadapan. Dengan begitulah mungkin "obyektivitas" yang tertinggi bisa diharapkan. Sifat fungsionalnya bukanlah sesuatu yang intrinsik dalam studi, tetapi sesuatu berada di luarnya. Setelah studi selesai, maka pertanyaan tentang "apa yang bisa dilakukan", barulah bisa diajukan dengan keras. Terlepas dari hasrat untuk memprimumikan ilmu-ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan, tradisi ilmu yang membuat jarak yang ekstrim antara sasaran penelitian dengan meneliti itu memang berasal dari Barat. Dalam hal ini, dapatlah dikatakan bahwa studi tentang Minangkabau telah makin bersifat internasional. Kecenderungan ini terutama sekali kelihatan setelah tahun 1970.

Berbagai hal tentang ini telah pernah saya laporkan.²⁴ Namun sepantas lalu dapat saya sampaikan bahwa jika di zaman kolonial studi Minangkabau praktis dimonopoli oleh sarjana-sarjana Belanda — antara lain menghasilkan setidaknya dua disertasi dan satu studi klasik dari Schrieke,²⁵ di samping puluhan artikel dan buku tebal — kini berbagai sarjana dari berbagai bangsa telah ikut serta. Maka tidaklah terlalu berlebih-lebihan sesungguhnya jika di bulan September 1980 diadakan seminar internasional tentang masyarakat, kebudayaan, dan sastra Minangkabau di Bukittinggi. Panitia seminar tak mengada-ada. Dan seminar itu menjadi "betul-betul internasional", ketika di bulan April 1981 hal yang sama juga diadakan di Amsterdam.

Tradisi penulisan ilmiah modern ini, yang umumnya lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang khusus dan lebih memperhatikan keadaan yang secara empiris bisa diperhatikan, telah menghasilkan berbagai disertasi dan buku. Meskipun sebagian terbesar studi-studi itu lebih bersifat teknis, setidaknya dua buku sejarah yang cukup populer telah dihasilkan. Yang pertama ialah buku yang dikerjakan oleh M.D. Mansur dan kawan-kawan,²⁶ yang mencoba menyelusuri sejarah Minangkabau dari masa prasejarah sampai periode mutakhir. Yang kedua dan juga jauh lebih berhasil, ialah karya Rusli Amran,²⁷ yang hampir secara *exhaustive* mempergunakan sumber-sumber tercetak Belanda. Meskipun dikerjakan oleh seorang yang resminya tidak mendapat latihan dalam ilmu sejarah, buku ini adalah buku sejarah-berkisah, *narrative*, terlengkap dari zaman Hindu sampai 1833 yang pernah diterbitkan. Kelemahan dari buku ini ialah keengganan penulisnya mempertimbangkan sumber asli dan belum sempatnya ia menggarap arsip-arsip.

Demikianlah secara sepantas lalu "peta bumi" penulisan adat dan kebudaya-

24 Taufik Abdullah, "Studi tentang Minangkabau" (Makalah pada Seminar Internasional Tentang Minangkabau, Bukittinggi, 6-8 September 1980), dimuat dalam *Majalah Nagari*, 2 (Mei 1980): 36-43.

25 B. Schrieke, "Causes and Effect" dan *Pergolakan Agama*.

26 M.D. Mansur dan kawan-kawan, *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bhratara, 1970.

27 Rusli Amran, *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981.

an Minangkabau. Dari segi inilah kelihatan suatu keistimewaan dari buku yang dihasilkan oleh Navis. Dari sudut tradisi penulisan ia termasuk golongan yang sadar bahwa ia adalah *participant* dari masalah yang ingin dibicarakannya. Tetapi catatan-catatan yang diberikannya, lebih mengarah kepada keinginan untuk ikut serta sebagai *observer*. Lebih penting lagi sebenarnya ialah tanpa menempatkan dirinya sebagai kritikus terhadap sasaran penelitiannya, dengan jelas pula kelihatan bahwa ia bukanlah *literati* yang ingin mengelus-elus hal-hal yang ditulisnya. Apakah ini suatu pertanda pula?

Memang benar, kata pepatah *sakali aie gadang, sakali tapian baraliah*, tetapi bagaimanapun juga adat *indak laluak dek hujan, indak lakang dek paneh*.

Jakarta, Juli 1982

Taufik Abdullah

PENGANTAR

Waktu saya bekerja di Jawatan Kebudayaan Provinsi Sumatera Tengah pada tahun 1952 - 1955 banyak tamu yang datang mencari informasi *Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jawatan tidak dapat membantu sebagaimana mestinya, sehingga mereka dibawa kepada orang yang menurut pendapat umum adalah ahlinya. Namun, banyak pertanyaan tidak terjawab, tidak dapat dipahami, dan tidak teruji kebenarannya. Sedangkan buku yang ada, bukan saja isinya tidak memadai, melainkan juga sulit dipahami terutama oleh orang yang bukan orang Minangkabau.

Semenjak itu saya mencoba mempelajari adat dan kebudayaan Minangkabau dengan mengumpulkan bahan dan informasi dari buku-buku dan dari lapangan. Setelah saya berhenti bekerja di jawatan itu, kegiatan yang telah telanjur itu saya lanjutkan terus, meski tidak intensif. Kemudian saya mencoba menulisnya dengan tujuan memberikan informasi yang lengkap, ringkas, tetapi mudah dipahami semua pembaca. Ternyata tidaklah mudah menulis kannya, sehingga tidak kurang dari delapan kali saya mengulanginya sampai buku ini terwujud seperti sekarang.

Tujuan penulisan buku ini bukan untuk membuatkan karya ilmiah melainkan sekadar usaha menyampaikan informasi. Namun, saya mendapat banyak kesulitan dalam memilih bahan untuk ditulis. Kesulitan itu disebabkan antara

lain banyaknya perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan kebudayaan Minangkabau serta banyaknya pula tulisan dan keterangan yang tidak luput dari tafsiran menurut kecenderungan orang per orang. Oleh karena itu, cara penulisan pokok buku ini diusahakan agar betul-betul bersifat informatif, sedangkan setiap perubahan yang telah terjadi atau penafsiran yang pernah ditulis dicantumkan pada *catatan kaki* berikut referensinya. Hal ini dimaksudkan agar pembaca yang ingin memperluas dan memperdalam pengetahuannya tentang Minangkabau dapat menelusuri sumber-sumber tulisan ini dengan mudah.

Dalam memilih bahan untuk tulisan pokok digunakan pendekatan seperti falsafah Minangkabau yang berpangkal pada *alam terkembang jadi guru* dan digunakan pedoman *pepatah* serta *petitih* yang merupakan produk asli kebudayaan Minangkabau itu. Untuk bebagai pengertian yang ditimbulkan oleh berbagai istilah dan nama yang khas, ditelusuri bahasa Sanskerta yang menjadi bahasa cendekiawan Minangkabau kuno. Bahan-bahan yang tidak sesuai dengan falsafah alam Minangkabau dan istilah serta nama yang tidak ditemui dalam bahasa Sanskerta, tetapi telah menjadi bagian kehidupan dan kebudayaan Minangkabau, dicoba diuraikan pada *catatan kaki*. Dengan demikian, catatan kaki merupakan karangan tersendiri yang memuat berbagai tafsiran dan analisa.

Beberapa bab yang tidak mencantumkan referensinya berarti bahwa bab itu ditulis berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. Sedangkan sistem penulisannya tidak luput dari analisa atau tafsiran yang bertolak dari pendekatan yang sama dengan bab lainnya.

Dalam menuliskan kalimat dan istilah digunakan dua cara. Kalimat yang khas Minangkabau, seperti peribahasa, dicantumkan sebagaimana aslinya, dalam tanda kursif dicantumkan alih bahasanya ke bahasa Indonesia secara harfiah, dengan tujuan untuk memelihara irama gaya sastranya, kemudian barulah diberikan penafsirannya. Mungkin penafsiran ini tidak cukup memuaskan karena terlalu pendek, sedangkan penafsiran yang memuaskan mungkin akan menjadikan uraian yang panjang. Dan hal itu tidaklah menjadi tujuan buku ini. Sedangkan nama dan istilah yang dijadikan nama ditulis dalam bentuk yang telah umum dipakai penulis lainnya.

Dengan mencantumkan gambar-gambar yang diperlukan, diharapkan buku ini dapat memberikan informasi yang memuaskan dan juga dapat menjadi pengantar untuk mengenal serta memahami adat dan kebudayaan Minangkabau.

Akhirnya kepada semua teman yang telah membantu dan mendorong saya menulis dan menyelesaikan naskah buku ini, saya menyampaikan terima kasih.

Padang, 5 Januari 1982

FALSAFAH ALAM

rang Minangkabau menamakan tanah airnya *Alam Minangkabau*. Pemakaian kata *alam* itu mengandung makna yang tidak bertara. Alam bagi mereka ialah segala-galanya, bukan hanya sebagai tempat lahir dan tempat mati, tempat hidup dan berkembang, melainkan juga mempunyai makna filosofis, seperti yang diungkapkan dalam mamangannya: *Alam takambang jadi guru* (Alam terkembang jadi guru). Oleh karena itu, ajaran dan pandangan hidup mereka yang dinukilkan dalam *pepatah, petith, pituah, mamangan, serta lain-lainnya mengambil ungkapan dari bentuk, sifat, dan kehidupan alam*.¹

*Alam dan segenap unsurnya mereka lihat senantiasa terdiri dari empat atau dapat dibagi dalam empat, yang mereka sebut *nan ampek* (yang empat)*². Seperti halnya: ada matahari, ada bulan, ada bumi, ada bintang, ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang; ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan; ada api, ada air, ada tanah, ada angin. Semua unsur alam yang berbeda kadar dan perannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu masing-masing hidup dengan eksistensinya dalam suatu harmo-

1 Perihal pepatah, petith, dan sebagainya lihat bab "Kesusastraan".

2 Pengertian *Nan Ampek* lihat lebih lanjut bab "Undang-Undang dan Hukum".

ni, tetapi dinamis sesuai dengan dialektika alam yang mereka namakan *bakara-no bakajadian* (bersebab dan berakibat).³

Bila alam dengan segala unsurnya itu dikiaskan kepada kehidupan manusia, sebagaimana mereka mengiaskan alam sebagai tanah air Minangkabaunya, maka pemahaman unsur alam bermakna sebagai lembaga atau individu dalam masyarakat mereka. Dan masing-masing berhak mempertahankan eksistensi dalam perjalanan hidupnya. Sebaliknya, setiap lembaga mempunyai kewajiban untuk memelihara eksistensi individu dalam lembaganya masing-masing, di samping setiap individu pun berkewajiban memelihara eksistensi lembaganya pula. Sedangkan harmoni dipahamkan sebagai keselarasan atau kesesuaian hidup sesama lembaga dan sesama individu, antara lembaga dan individu, dan sebaliknya. Setiap lembaga atau individu mempunyai perbedaan dalam kadar dan perannya. Oleh karena itu, mereka tidak akan dapat *bersatu* dengan yang lain, tetapi akan tetap *sama* dengan yang lain. Jadi, dalam dinamika harmoni, mereka dalam *masing-masing* menjadi *satu* untuk *bersama* dan *masing-masing* menjadi *sama* untuk *bersendiri-sendiri*.⁴

Manusia dan individu

Falsafah alam Minangkabau meletakkan manusia sebagai salah satu unsur yang statusnya sama dengan unsur lainnya, seperti tanah, rumah, suku, dan *nagari*. Persamaan status itu mereka lihat dari keperluan budi daya manusia itu sendiri. Setiap manusia, secara bersama atau sendiri-sendiri, memerlukan tanah, rumah, suku, dan nagari sebagaimana mereka memerlukan manusia atau orang lain bagi kepentingan lahir dan batinnya. Oleh karena itu, sangat sulit menurut alam pikiran mereka jika seseorang tidak memiliki keperluan hidup lahir dan batin itu.⁵ Menurut alam pikiran mereka, manusia atau orang merupakan sesuatu yang sempurna, seperti sempurnanya matahari dengan sinarnya, bulan dengan cahayanya, api dengan panasnya, angin dengan hem-

3 Lih. M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta, Bulan Bintang, 1971, hlm. 146-150.

4. *Ibid*. hlm. 77 - 82 dan 127 - 130. Menyusun sistematika falsafah adat Minangkabau tidaklah mudah karena tidak mungkin menyusunnya dengan menggunakan pola ilmu falsafah lainnya, lebih-lebih dalam karangan yang bertujuan memberikan informasi secara singkat. M. Nasroen yang telah menyusun buku setebal 232 halaman pun merasakan kesulitannya. Lih. *ibid* hlm. 46.

5 Menurut pemahaman orang Minangkabau, setiap orang harus jelas asal-usulnya, jelas sukunya, jelas nagarinya. Di samping itu harus pula jelas *sasok jarainya* (sawah ladangnya), harus jelas pendam pekuburannya. Maksudnya, setiap orang Minangkabau tentulah mempunyai harta pusaka yang berupa tanah dan tempat nenek moyangnya dikuburkan. Tanpa dapat menjelaskan kedua hal itu, ia akan dipandang bukan orang Minangkabau. Dan sebagai manusia ia akan dipandang "orang kurang"

busannya. Yang tidak mempunyai salah satu atau semua keperluan budi daya akan dipandang sebagai *orang kurang*. Oleh karena itu, setiap manusia atau orang dipandang dalam status yang sama. *Tagak samo tinggi, duduak samo randah* (tegak sama tinggi, duduk sama rendah), kata pituah mereka.

Kenyataan alam sebagaimana mereka lihat, secara fungsional, mempunyai perbedaan. Perbedaan fungsional itu tidaklah menyebabkan penilaianya berbeda. Api dengan panasnya, air dengan basahnya, angin dengan hembusannya, dan tanah dengan padatnya mempunyai fungsi atau peran yang berbeda, tetapi nilainya tidak dapat dibedakan karena mereka sama dibutuhkan. Demikian pulalah dengan manusia dalam fungsi dan perannya yang saling berbeda menurut kodrat dan harkat yang diberikan alam kepadanya, tetapi nilainya tetaplah sama. Mamangan mereka mengatakan: *Nan buto paambuih lasuang, nan pakak palapeh badia, nan lumpuh paunyi rumah, nan kuaik pambao babau, nan binguang disuruh-suruah, nan cadiak lawan barundiang* (yang buta penghemus lesung, yang pekak pelepas bedil, yang lumpuh penghuni rumah, yang kuat pemikul beban, yang bodoh disuruh-suruah, yang pintar lawan berunding). Pengertiannya, dapat secara tersurat ataupun secara tersirat, adalah pemanfaatan peran seseorang menurut kodratnya masing-masing. Menurut harkatnya, fungsi seseorang pun akan berbeda dari yang lain karena ada yang jadi petani, tukang, pedagang, penghulu, ulama atau, hulubalang. Namun, karena mereka manusia atau orang, dan saling membutuhkan dalam kehidupan mereka masing-masing, maka penilaian dan kedudukannya sama. Misalnya, dibutuhkan angin untuk menghembus bara api agar menyala untuk memanaskan air supaya buah tanah menjadi masak.

Secara sosio-psikologis, kemampuan manusia dalam berbuat sesuatu tidaklah sama. Sesuai dengan contoh yang diberikan alam ada bermacam-macam pohon dengan bermacam-macam buah yang berbeda bentuk dan rasanya. Buah yang disukai ialah buah yang paling lezat rasanya, apa itu manggis, apa itu mangga, apa itu pisang, apa itu duren dan nangka. Oleh karena itu, perbedaan pandangan terhadap manusia ditentukan prestasinya dalam berusaha menjadi mulia, ternama, pintar, atau kaya. Mamangan memberi petunjuk untuk prestasi yang terbaik bagi masing-masing usaha yang mungkin dapat dicapai manusia, katanya: *Nak mulia batabua urai, nak tuah tagak di nan manang, nak cadiak sungguah baguru, nak kayo kuaik mancari* (hendak mulia suka memberi, hendak ternama dirikan kemenangan, hendak pandai rajin berguru, hendak kaya kuat berusaha). Maksudnya setiap orang harus berusaha sekuat-kuatnya bila ingin mendapat tempat yang terkemuka.

Untuk memperoleh hasil yang paling baik dan bernilai, sama dengan yang lain, tergantung pada kondisi dan situasinya pula. Umpamanya contoh yang diberikan alam, dari pohon yang jenisnya sama akan dihasilkan buah yang sama, tetapi tidak selalu bobot dan mutu kelezatannya akan sama. Pohon

membutuhkan pupuk dan pengolahan. Demikian pula dengan manusia, yang menjadi besar karena dibesarkan, seperti kata petitihnya: *Gadang dek diambak, tinggi dek dianjuang* (besar karena diambil, tinggi karena dianjung). Maksudnya, seseorang yang mencapai prestasi ialah karena dibantu dan ditopang orang lain.

Menurut strukturnya, seseorang adalah individu dan semua individu adalah anggota masyarakat etnis dan lingkungannya. Sedangkan menurut sistem masyarakatnya yang komunal, setiap individu adalah milik masyarakatnya dan masyarakat itu sendiri adalah milik bersama dari setiap individu. Oleh karena saling memiliki, kedua belah pihak tidak dapat saling menguasai. Uraiannya ialah bahwa setiap individu dapat membangun dirinya. Sebagai anggota masyarakat, ia akan dibela dan didorong kerabat dan lingkungannya agar menjadi orang.⁶ Oleh karena setiap individu menjadi besar dan tinggi berkat masyarakat sendiri, setiap individu akan merasa dirinya berutang budi. Dan betapa pun besar egonya, ia tidak akan dapat mengembangkan ambisi yang akan merugikan orang lain, apalagi masyarakatnya sendiri. Malah sebaliknya, karena ia selalu merasa berutang, ia senantiasa merasa perlu membayarnya kembali sepanjang hidupnya. Oleh karena ia telah membayar di sepanjang hidupnya, lambat laun ia akan merasakan bahwa masyarakat itu adalah sebagian dari dirinya sendiri, miliknya juga, yang harus dibela dan didorong agar menjadi berharga seperti masyarakat lain yang berada di luar lingkungannya.

Harga Diri

Meletakkan kedudukan seseorang agar menjadi berarti dan penting atau setidak-tidaknya sama dengan orang lain ditopang ego manusia sendiri. Ego itu didorong motivasi yang bertema *malawan dunia urang* (melawan dunia

6 *Menjadi orang* adalah suatu ucapan simbolis bagi masyarakat Minangkabau. Sejak kecil anak-anak telah diajar untuk *menjadi orang*, baik dalam nyanyian ibunya maupun dalam ajaran dan nasihat orang tua-tua. Apa yang dimaksud dengan *orang* lihat bab "Undang-Undang dan Hukum" pada bagian Orang. Dalam nyanyian atau nasihat mereka kepada anak-anak mereka tidak pernah dianjurkan agar anak-anak mereka menjadi seorang fungsional, karena jabatan bukanlah suatu fungsi yang harus diperjuangkan untuk memperolehnya. Dalam kehidupan modern, nyanyian atau nasihat itu tidak berubah pada prinsipnya. Yang menjadi buah nyanyian tetaplah agar menjadi orang yang berilmu, seperti dokter atau mister (maksudnya sarjana hukum), menjadi orang alim dan orang kaya atau semua gelar yang dapat diperjuangkan oleh setiap orang tanpa merugikan atau mengurangkan hak-hak orang lain. Jadi, menurut alam pikiran mereka, suatu jabatan, seperti penghulu, imam, atau menjadi priayi tidaklah dijadikan sasaran perjuangan sebagai suatu cita-cita. Mungkin, memperjuangkan jabatan akan menimbulkan perebutan, bahkan juga persengketaan, antara sesamanya. Perebutan dan persengketaan bukanlah hal yang terpuji dalam ajaran falsafah Minangkabau, apa pun motifnya.

orang). Tema itu mengandung amanat untuk hidup bersaing terus-menerus dalam mencapai kemuliaan, kenamaan, kepintaran, dan kekayaan seperti yang dimiliki orang lain, seperti yang diungkapkan pituah: *Mau mulia bertabur urai, mau ternama dirikan kemenangan, mau pintar rajin berguru, mau kaya kuat berusaha*. Nilai yang dicapai pada persaingan dalam "melawan dunia orang" diukur dengan kondisi dan prestasi orang lain, seperti yang diungkapkan mamangan dan pituah, yang antara lain ialah: *Baa di urang, baa di awak* (bagaimana orang, demikian kita). Artinya bila orang mampu, kita pun tentulah mampu pula, dan sebaliknya bila kita mampu, orang lain pun tentulah mampu pula.

Oleh karena setiap orang dengan egonya masing-masing membawa ambisi, persaingan antara sesama dapat menjadi pertarungan untuk saling mengalahkan. Terjadilah disharmoni yang tidak sesuai dengan ajaran alam yang dijadikan guru itu. Untuk menghindarkan bentrokan itu, mereka membuat hukum dan aturan yang mengikat setiap individu agar tidak terlepas dari kendali, yaitu dengan sistem kekerabatan dan ekonomi komunal berdasarkan paham etnis yang menganut stelsel matrilineal serta sistem perkawinan antar-etnis dengan cara eksogami.⁷

Di samping itu, ajaran dalam bentuk pepatah, petitih, pituah, dan mamangan, yang setiap kesempatan diulang-ulang penyampaiannya, menanamkan bahwa persaingan hidup itu penting, tetapi keselarasan untuk menjaga keseimbangan pun sama pentingnya. Pituah yang paling penting, di samping ungkapan lain, dalam menjaga keseimbangan itu ialah: *Kurang sio-sio, labiah ancak-ancak* (kurang adalah sia-sia, berlebih adalah kegilaan). Artinya, adalah suatu kesia-siaan jika merasa diri kurang dari orang lain, tetapi juga adalah suatu kegilaan bila menganggap diri lebih dari orang lain. Sebab, manusia mempunyai peralatan yang terbatas, sehingga kemampuannya pun terbatas, seperti yang diungkapkan pituah; *Manjangkau sarantang tangan, mamikua sakuaik bahu, malompek saayun langkah, bakato sapanjang aka* (menjangkau serentang tangan, memikul sekutu bahu, melompat seayun langkah, berkata sepanjang akal). Maksudnya dalam hidup melawan dunia orang, diperlukan pengetahuan atas kemampuan diri, yang lazimnya disebut dengan *tahu diri* (mawas diri).

Pemahaman atas makna *tahu diri* berlaku untuk semua orang, bagi yang berposisi lemah dan juga bagi yang berposisi kuat. Yang lemah disuruh berlaku sesuai dengan kemampuannya, yaitu jika: *Bakato di bawah-bawah, mandi di ilia-ilia* (berkata di bawah-bawah, mandi di hilir-hilir). Maksudnya yang lemah posisinya agar bertingkah laku yang sesuai dengan kondisi dan kemampuannya tanpa mengurangkan harga dirinya sebab *kurang adalah sia-sia*. Sedangkan kalau ia bertingkah laku menyamakan dirinya dengan orang yang besar kemampuannya, maka yang dilakukannya merupakan *ancak-ancak* atau *kegilaan*.

7 Tentang sistem perkawinan lihat bab "Perkawinan"

Orang yang berposisi kuat juga harus *tahu diri* bahwa dia kuat. Namun, pituah memberi peringatan: *Nan gadang ijan malendan* (yang besar jangan melanda), yang maksudnya orang besar atau kuat jangan meremehkan orang yang kecil dan lemah karena orang kecil itu pun tahu harga dirinya pula. Posisi orang besar di mata orang kecil ibarat pohon beringin, yaitu: *Daunyu tampek balinduang, batanguyo tampek basanda, dahanu tampek bagantuang, urekuyo tampek baselo* (daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar, dahananya tempat bergantung, uratnya tempat bersila).⁸ Sungguhpun demikian, orang besar atau orang kuat itu harus *tahu diri* sesuai pituah bahwa: *Kok kayo, urang indak ka mamintak; kok cadiak, urang indak ka batanyo; kok kuaik, urang indak ka balinduang; kok bagak, urang indak ka baparang* (jika kaya, orang takkan meminta; jika pintar, orang takkan bertanya; jika kuat orang takkan berlindung; jika berani, orang takkan berperang), yang maksudnya bahwa terhadap orang besar

8 Nahuys van Burgst, doktor dalam ilmu hukum berpangkat mayor jenderal, membuat laporan yang diterbitkan pada tahun 1825 tentang tingkah laku orang Minangkabau yang tidak merasa rendah dari orang lain. Ketika ia berkunjung ke istana Sutan Alam Bagagarsyah (yang tidak dapat dibandingkan dengan istana raja-raja di Jawa), ia melihat orang-orang hilir mudik dekat raja tanpa memperlihatkan sikap hormat sama sekali. Tidak terlihat iring-iringan kebesaran. Sutan Alam Bagagarsyah membawa keperluannya sendiri, seperti tempat rokok, tempat sirih, tempat tusuk gigi, atau korek telinga, yang masing-masing dimasukkan dalam uncang (pundi-pundi) yang bergantungan di ikat pinggangnya. Ia memang dipayungi seseorang, tetapi payungnya hanyalah seperti payung yang oleh banyak orang digunakan di Jawa. Penghormatan terhadap Sutan Alam Bagagarsyah semacam itu bukan karena pengaruh Paderi. Terhadap pimpinan lainnya pun rakyat tidak bersikap hormat, seperti yang dilihatnya pada rakyat di Pulau Jawa terhadap bangsawan keraton. Ia berpendapat bahwa tingkah laku rakyat seperti itu sebagai tanda orang yang tidak merasa rendah diri. Dan ketika rombongannya datang, para penghulu yang menyambut bersikap acuh tak acuh saja. Bahkan ketika rombongan Belanda yang menyertai Nahuys kembali melewati Bukit Ambacang tidak seorang pun dari dua belas orang kuli yang telah disewa yang menanti kedatangan mereka untuk mengangkut barang-barang rombongan itu. Terpaksalah rombongan itu mengangkut barang masing-masing menuruni dan mendaki bukit-bukit. Katanya, rakyat Minangkabau sangat bersikap merdeka. Bahkan ketika ditanyai bagaimana sikap para penghulu seandainya Belanda pergi, maka jawaban mereka ialah: "Kalau kami bisa hidup damai dengan Paderi, kami tidak lagi membutuhkan orang Belanda lagi di sini." (Lihat Rusli Amran, Sumatra Barat hingga Plakat Panjang, Jakarta, Sinar Harapan, hlm. 428). De Steurs dalam laporannya mengatakan bahwa orang Minangkabau tidak atau sedikit sekali menganggap dirinya sebagai orang bawahan. Kemerdekaan pribadi mereka begitu tinggi sehingga praktis tidak ada perbedaan antara pemimpin/penghulu dan orang biasa, kecuali mengenai nama-nama saja. Semua orang mau memerintah dan tidak ada yang mau diperintah. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang tidak kaya. Mereka tidak memandang tinggi supremasi pemerintah. Berbeda dengan orang Jawa, katanya, orang Minangkabau selalu saja menjawab "Iyo, iyo", terhadap peraturan pemerintah, tetapi mereka tidak melaksanakan, sedangkan orang Jawa akan mematuhiinya. Kalau dipaksa dan diancam, mereka akan meninggalkan kampung halamannya dan berdiam di hutan-hutan untuk menghindarkan diri dari pengusiran orang lain. (Rusli Amran, *op. cit.*, hlm. 445). Sebaliknya Hendriks, seorang kapten,

atau kuat, orang kecil tidak akan mau merendahkan diri kepadanya.⁹ Terhadap tindakan orang besar atau orang kuat yang suka memamerkan dirinya, pemeo memberikan peringatan dengan ungkapan: *Elok-elok urang di ateh, nan di bawah kok manimpo* (hati-hatilah orang atasan, yang di bawah mungkin menimpak). Yang maksudnya jika orang kecil melakukan perlawanannya, maka keserasian alam akan rusak dan itu tentulah merupakan kiamat.¹⁰

Malu yang Tidak Dapat Dibagi

Merasa diri kurang berharga merupakan kesia-siaan. Merasa diri lebih berharga merupakan kegilaan. Akan tetapi, *harga diri* yang jatuh merupakan aib yang memalukan. Tingkah laku yang merupakan aib bukan hanya menurut ukuran moral dan etik yang umum, juga meletakkan harga diri lebih rendah dari orang lain, terutama pada orang lain yang berada di luar lingkungan dan kerabat sendiri, merupakan keaiban yang paling tidak bisa dimaafkan. Keaiban demikian akan "menampar" semua muka kaum kerabat secara etnis atau lingkungan. Menurut peribahasa mereka: *Seekor kerbau berkubang semuanya kena*

menulis bahwa bagaimanapun berani dan nekatnya orang-orang Paderi dalam peperangan, jika mereka sekali menyerah, mereka sangat menurut, damai, dan banyak yang dapat kita kerjakan dari mereka. Syaratnya ialah asal kita perlakukan mereka dengan wajar. Tegas boleh, tetapi wajar. (Rusli Amran, *op. cit.* "hlm. 405). Sedangkan Jenderal Michiels heran melihat rakyat Bonjol yang telah dikalahkan menjadi penduduk yang patuh, sehingga mereka tidak mengeluh ketika tertimpa malapetaka dan kesengsaraan pada waktu melaksanakan "kopie stelsel" yang berat itu. Suatu hal yang sangat mengherankan mengapa rakyat yang begitu gigih dalam melakukan pemberontakan menjadi diam saja terhadap tekanan hidup yang dipaksakan bekas musuhnya. Lain lagi pengalaman De Steurs. Ia berkata bahwa orang Minangkabau merupakan bangsa yang tidak mempunyai perasaan rendah diri sama sekali terhadap orang Belanda. Mereka biasa saja menegur De Steurs di jalan, menyetop dan minta menyalaikan rokok dari api cerutu yang sedang diisap residen dan komandan militer itu. Jenderal Van Swieten (pengganti Michiels) mengatakan bahwa yang dialami De Steurs sudah baik kalau mereka memintanya lebih dahulu. Tidak jarang terjadi cerutu itu mereka cabut begitu saja dari mulut si Belanda untuk mengambil apinya, tanpa berkata apa-apa. (Lihat juga Rusli Amran, *op. cit.* lm. 406).

⁹ Orang Minangkabau pantang mengeluh, menangis, atau mengadukan kesulitannya kepada orang lain. Untuk mengatasi kesulitan pribadinya, ia lebih suka menyanyikannya atau pergi merantau dengan membawa hati yang iba. Lihat juga M. Rajab, *Perjalanan di Sumatra*, Jakarta Balai Pustaka, 1949. hlm. (?). Bahkan kepada pasangan hidupnya pun, mereka tidak suka menyampaikan kesulitan pribadinya.

¹⁰ Orang Minangkabau mempunyai naluri, berkat ajaran falsafahnya, untuk menentang setiap perkosaan terhadap nilai-nilai falsafah hidupnya, yaitu harga diri yang sama. Pemberontakan yang terjadi dalam sejarah Minangkabau pada dasarnya bermotifkan hal itu. Lihat juga bab "Sejarah". Secara individual dapat dilihat pada tingkah laku dr. A. Rivai, yang merasa dirinya sama dengan orang lain, sehingga ia tidak mau diperintah dan dihina orang lain, bahkan oleh orang Belanda yang menjadi penguasa masa itu. Untuk menyatakan dirinya sama dengan Belanda, ia berlagak seperti Belanda, menaturalisasi diri sebagai Belanda dan menikahi gadis-gadis Eropa, seperti Belanda, Inggris, dan Jerman. Ia memaki-maki bangsanya

lumpurnya. Keaiban karena merendahkan diri pada orang lain adalah keaiban yang tidak dapat ditebus, tidak dapat dibayar, bahkan tidak dapat dibagi-bagikan. Hal ini disebabkan rasa malu yang diderita. Mamang mereka mengatakan: *Kok tanah sebingkah alah bamiliaik, kok rumpuik salai alah bapunyo, malu naan alun babagi* (jika tanah sebongkah telah bermilik, rumput sehelai telah berpunya, malu yang tidak dapat dibagikan). Menurut alam pikiran mereka, merendahkan harga diri yang tidak bisa dimaafkan antara lain mengemis dan menjadi budak yang sama dengan menjual diri atau melacur. Sedangkan, mengeluh atau menangisi kesulitan hidup sudah merupakan pantangan dan bila dilakukan sudah merupakan keaiban, apalagi mengemis yang bersifat meminta belas kasihan atau menjual diri kepada orang lain. Rasa malu yang diderita itu melibatkan seluruh kerabat dan lingkungan masyarakatnya sendiri karena perbuatan itu mencemarkan mereka seolah-olah tidak mampu menghiraukan dan melindungi kerabat sendiri atau warga masyarakat sendiri. Seolah-olah lingkungan kerabat dan masyarakatnya telah mengabaikan sistem hidup yang mereka muliakan dan pegang seumur hidup, yaitu adat mereka yang tinggi.¹¹

Untuk menjaga agar tidak seorang pun akan "kena lumpur" aib itu, ajaran

yang "inlander" dan menghasut mereka agar menjadi bangsa yang sederajat dengan bangsa Belanda. (tentang dr. A. Rivai lihat lebih lanjut, Dr. M. Amir. *Bunga Rampai*, Medan, 1983). H. Agus Salim berbuat yang sama dengan dr. A. Rivai dalam berhadapan dengan Belanda yang otaknya tidak pintar tetapi mendapat kesempatan yang lebih luas. Ia menentang perlakuan yang tidak adil dan meremehkannya. Memang, ia tidak ekstrem seperti Rivai, tetapi ia tidak kurang radikalnya. Ia memilih hidup yang kontras dengan Belanda. Ia hidup bertahan dalam kemiskinan asal bisa hidup merdeka di atas kakinya sendiri, sehingga anak-anaknya pun tidak disekolahkannya. Namun, pada setiap kesempatan ia senantiasa menunjukkan dirinya lebih dari Belanda. Ia memimpin bangsanya untuk kebebasan. Dan ia menjadi anggota Dewan Rakyat demi persamaan perlakuan terhadapnya. Kemudian ia berhenti untuk menyatakan kebebasan dan harga dirinya. Sedangkan Tan Malaka menjadi revolucioner karena menentang penghinaaan Belanda yang ia terima ketika ia menjadi guru di perkebunan. Ia menjadi komunis dan melakukan pemberontakan untuk mempercepat proses kemerdekaan bangsanya. Ketika ia melihat komunisme yang diterapkan komintern di bawah Stalin, ia keluar dari partai itu lalu mendirikan partai tandingan khusus untuk bangsanya. Ketika ia ditangkap, ia memilih buangan ke luar negeri daripada dipenjarakan atau dibuang ke Digul karena di luar negeri ia merasa lebih merdeka. (Tentang sikap hidup dan perjuangan Tan Malaka lihat juga tulisan Alfian yang berjudul "Tan Malaka: Pejuang Revolucioner yang Kesepian" dalam *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, Jakarta, LP3ES, 1979).

11 Orang-orang Minangkabau yang melakukan pekerjaan hina, seperti mencuri, mengemis, dan melacur, senantiasa menyembunyikan asal-usul kaum dan nagarinya karena motivasi ingin memelihara nama baik asal-usulnya. Demikian pula halnya dengan kerabat dan orang dari nagarinya tidak akan mau mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat hina itu dikenalnya. Pada tahun 1930 Kerapatan Nagari Kurai di Bukittinggi membuat keputusan melarang anak kemenakannya yang perempuan menjadi pengasuh anak pada keluarga Cina di Bukittinggi karena perbuatan itu dipandang merendahkan martabat kaum.

mereka menyuruh setiap orang pandai menyimpan aib dari mata orang lain, seperti yang diungkapkan pituahnya: *Mamakan habih-habih, manyuruak hilang-hilang* memakan betul-betul habis, bersembunyi betul-betul hilang. Aib atau kehinaan yang memalukan harus merupakan rahasia yang perlu disembunyikan.¹² Jika harus dibuka untuk mencari perbaikan, ia hanya akan disampaikan kepada kerabat yang paling dekat. Jika kerabat yang paling dekat tidak dapat memecahkannya sendiri, ia harus dibawa kepada kerabat yang lebih luas. Tidak boleh kepada orang lain di luar lingkungan kekerabatan. Keibaian itu haruslah dilokalisasikan betul-betul, yang mereka ungkapkan dengan mamangan: *Babiliak ketek, babiliak gadang* (berbilik kecil, berbilik besar). Yang maksudnya apabila rahasia itu merupakan rahasia kamar, jangan tahu orang serumah; kalau rahasia itu merupakan rahasia serumah, tetangga jangan sampai tahu, demikian seterusnya. Orang yang sampai menceritakan aib kerabatnya sendiri mereka namakan *pamacah tubo* (penyebar racun).¹³

12 Mungkin karena stelsel matrilinealnya, mereka lazimnya akan menyampaikan masalah pribadinya kepada ibunya atau kepada neneknya, kalau ibunya tidak ada. Kalau keduanya tidak ada, ia akan menyampaikannya kepada saudara perempuannya yang tertua. Nanti mereka itulah yang akan membicarakannya kepada mamaknya. Adalah tidak lazim mereka mengadukan persoalananya kepada kerabat laki-lakinya meski kepada mamak atau bahkan kepada ayahnya sendiri.

13 Berbagai kasus yang dapat dikemukakan di sini misalnya yang menyangkut mereka. sebagai contoh, keluarga yang pulang dari rantau kehilangan gelang emas di suatu rumah di kampung pada saat banyak handai tolan datang menjenguk perantau itu. Ahli rumah merasa malu, terutama kepada orang semenda, suami perempuan yang pulang dari rantau, yang bukan orang yang berasal Minangkabau. Selidik punya selidik, cari punya cari, gelang emas itu tidak kunjung terjumpai meski ada beberapa orang yang dapat dicurigai. Oleh karena tidak tahan menderita malu, ahli rumah itu melapor kepada polisi. Polisi turun tangan, lalu menahan salah seorang yang paling dicurigai. Kerabat orang yang dicurigai itu merasa tersinggung karena merasa kaumnya dituduh mencuri. Salah seorang penghulu mereka menemui polisi meminta orang yang ditahan agar dibebaskan dengan menjamin barang yang hilang pasti akan dapat ditemukan. Anggota kerabat yang lain mendatangi rumah tempat gelang itu hilang untuk meyakinkan mereka bahwa gelang itu pasti salah letak. Tujuannya yang utama ialah untuk meyakinkan semenda yang orang luar itu bahwa di nagari mereka tidak ada pencuri, apalagi pencuri itu kerabatnya. Dua hari kemudian, gelang emas itu ditemukan keluarga yang dicurigai. Dikatakan bahwa gelang emas itu tidak dicuri, melainkan salah ambil oleh seorang cucu mereka yang masih berusia 4 tahun. Cucu ini menyangka gelang itu gelang mainan yang dijumpainya di lantai kamar mandi. Dan, katanya juga, gelang emas itu ditemui si cucu ketika ia sedang main lempar-lemparan dengan adiknya. Gelang itulah yang jadi sasaran lemparan permainan mereka. Kisah itu kelihatan dikarang demikian rupa, tetapi orang yang kehilangan serta para ahli rumah menyatakan bahwa mereka lahir yang bersalah karena terlalu cepat mencurigai serta mengadukannya kepada polisi. Persoalan itu dianggap selesai. Padahal, semua orang tahu bahwa gelang emas itu betul-betul dicuri perempuan yang sempat ditahan polisi karena memang perempuan itu dikenal sebagai orang yang suka mengambil milik orang lain.

Kasus lain yang dapat diambil sebagai contoh muncul ketika novel *Gerhana* dimuat berturut-

Untuk menutup rasa malu dalam menjaga *harga diri*, kepada mereka diajarkan agar mampu memikul risiko dan konsekuensinya, sebagaimana yang diungkapkan mamangan: *Kaki tadorong inai padahannya, muluik tadorong ameh padahannya* (kaki terdorong inai tantangannya, mulut terdorong emas tantangannya). Artinya segala sesuatu yang dapat merugikan atau menjatuhkan harga diri kaum atau diri sendiri hendaklah ditebus, agar tidak memberi malu. Ditebus dengan apa saja, meski sangat berat akibatnya, sebagaimana yang diungkapkan pemeo: *Tak aia talang dipancuang, tak kayu janjang dikapiang, tak ameh bungka diasah* (tak ada air talang dipancung, tak ada kayu jenjang dikeping, tak ada emas bungkal diasah). Pemeo ini dapat diartikan secara harfiah atau secara kiasan. Jika tidak ada air di tempat yang biasa, carilah ke tempat yang tidak biasa meskipun dengan bekerja keras memancung pohon bambu yang kemungkinan menyimpan atau tidak menyimpan air. Demikian pula andai kata tidak ada lagi kayu untuk memasak nasi, jenjang atau tangga rumah pun boleh dikepingi meski sesudah itu akan sulit naik ke rumah. Atau kalau tidak ada harta untuk mengatasi kesulitan, akali kesulitan itu dengan apa saja, meski dengan menipu.¹⁴

Apabila dengan segala cara *harga diri* yang telah jatuh itu tidak mungkin lagi dapat ditebus, ajaran mereka menganjurkan: *Daripada baputiah mato, labiah elok baputiah tulang* (daripada berputih mata, lebih baik berputih tulang), yang artinya daripada hidup menanggung malu lebih baik bunuh diri.¹⁵ Namun,

turut dalam harian *Kompas* sebagai cerita bersambung. Seorang dokter penyakit jiwa, yang berdiam di Pulau Jawa, berasal dari Minangkabau dan bergelar datuk pula, berpendapat bahwa pengarang novel *Gerhana* pastilah orang yang menderita sakit jiwa, karena telah mengungkapkan aib orang Minangkabau ke tengah umum dengan mengisahkan skandal-skandal yang terjadi di kalangan para sarjana di Sumatera Barat.

14 Ungkapan yang sangat luas dikenal masyarakat Indonesia, yang memberi kiasan tentang orang Minangkabau yang suka menipu, ialah *Padang buengkok*. Artinya, orang Padang (maksudnya orang Minangkabau) tidak lurus. Pada setiap bangsa tentu saja ada orang-orang yang tidak jujur. Namun, ungkapan yang terkenal luas itu memberi kesan seolah-olah banyak sekali orang Minangkabau yang suka menipu. Tampaknya, tabiat menipu mereka itu, selain karena tabiat manusia biasa, merupakan keharusan karena keterpaksaan untuk mengatasi kesulitan hidup sesaat, sebagai suatu alternatif dari pandangan hidup mereka yang tidak suka dan berpantang meminta belas kasihan atau meminta pertolongan orang yang bukan kerabatnya. Selanjutnya dalam pandangan orang Minangkabau, orang-orang yang tertipu tidak akan menimbulkan rasa simpati kepadanya. Mereka dipandang orang bodoh, orang yang memalukan kaum kerabatnya sendiri.

15 Bunuh diri karena merasa malu tampaknya menjadi pola kebudayaan mereka. Namun, ajaran Islam yang mereka anut tidak henti-hentinya mencegahnya karena merupakan dosa berat. Meski masih banyak orang bunuh diri karena motivasi demikian, tidak ada kasus orang membunuh orang lain demi menutup rasa malu, seperti yang bermusim dewasa ini di beberapa kota. Menghamili perempuan yang tidak boleh atau tidak patut dikawininya merupakan aib yang sangat memalukan. Untuk menutup aib itu, orang Minangkabau lebih

mati karena putus asa tidak dipujikan. Oleh karena itu, kalau mau mati hendaklah diperhitungkan masak-masak, sebagaimana yang dikatakan mamangan: *Hiduik baraka, mati bakiro* (hidup berakal, mati berkira).

Andai kata rasa malu itu datang karena harga diri dijatuhkan orang lain dengan cara penghinaan, pituah mereka mengajarkan agar mereka melakukan pembalasan: *Musuah indak dicari, basuo pantang diilakukan, tabujuu lalu, tabalintang patah* (musuh tidak dicari, bertemu pantang dielakkan, terbujur lalu, terlintang patah). Akan tetapi, apabila orang yang memberi hinaan yang memalukan itu terlalu kuat untuk dilawan, maka pemeo mereka mengajarkan: *Tak lalu dang di aia, di gurun ditanjakkan juo* (tidak dapat biduk lewat di air, di gurun pun dilewatkan juga). Artinya, kalau tidak dapat membala dengan cara biasa, maka balaslah dengan cara yang tidak biasa.¹⁶ Peringatan pembalasan orang kecil yang lemah terhadap perlakuan orang besar atau orang kuat seperti itu, diberikan pemeo: *Elok-elok urang di ateh, nan di bawah kok manimpo* (hati-hati orang di atas, yang di bawah mungkin menimpa). Orang kecil akan dapat membala kejahatan orang kuat dengan berbagai caranya.

Tidak mau mendapat malu karena tidak mampu *malawan dunia orang* merupakan motivasi untuk mencapai kemajuan dan kebanggaan serta menjaga harga diri. Hasilnya dapat berbentuk positif, tetapi juga berbentuk negatif.¹⁷

Pola Awak sama Awak

Sesuai dengan ajaran *Alam terkembang jadi guru* yang menjadi sumber falsafahnya, orang Minangkabau membentuk masyarakat yang komunalistik, baik dalam kediaman, sosial, maupun dalam usaha. Artinya, mereka itu hidup berkelompok. Setiap kelompok bukan hanya bergabung dengan kelompok lain dalam kelompok yang lebih besar, juga setiap kelompok yang kecil atau yang

suka memilih beberapa alternatif, seperti menerima hukum masyarakat yakni dikucilkan, merantau, atau membayari orang lain yang termasuk kerabatnya untuk membuat pengakuan dan menikahi perempuan itu. Ada saja kerabat yang bersedia membuat pengakuan demi menjaga nama baik kerabat dan kaum seumurnya dari keaiban.

- 16 Cara yang tidak biasa untuk membala hinaan itu ialah *mancido* (memberi cedera), yaitu memukul dari belakang dengan menggunakan alat yang keras, tanpa diketahui orang lain. Sebab, kalau ada orang lain yang tahu, mungkin hal itu akan menimbulkan perkelahian ramai antarkaum mereka yang bersengketa. Cara penggeroyakan beramai-ramai terhadap seseorang atau sedikit orang lazimnya dipakai sebagai tindakan polisional penduduk suatu desa terhadap orang luar yang melakukan salah tingkah di desa itu. Dalam berbagai novel Indonesia yang ditulis orang Minangkabau, seperti novel *Siti Nurbaya* dan *Sengasara Membawa Nikmat*, pemukulan terhadap lawan secara sembunyi-sembunyi itu telah dilukiskan dengan baik sekali.
- 17 Akibat positifnya ialah persaingan atau perlombaan dalam memajukan kaum kerabat atau nagari masing-masing, baik secara perseorangan maupun secara kolektif. Umpamanya, dalam masalah pendidikan anak-anaknya, mereka berlomba untuk menyekolahkannya

besar saling berbaur dengan identitas masing-masing yang terpelihara dalam suatu ikatan kebudayaan dan falsafah yang sama. Ibarat pengelompokan dan pembauran unsur-unsur alam yang dapat diraba indera manusia. Umpamanya, dalam kelompok kediaman, ada banyak kampung dalam satu nagari, ada banyak nagari dalam satu luhak, ada beberapa luhak dalam alam Minangkabau. Dalam kelompok sosial, ada banyak kelompok yang dimulai dari orang serumah tangga yang bergabung dalam satu kaum, banyak kaum bergabung dalam suku, dan banyak suku bergabung dalam *urang awak*. Penggabungan bukan berarti peleburan, melainkan seperti yang dirupakan riak air pada telaga yang ditimpa batu di beberapa tempat. Airnya beriak mulai dari titik tempat jatuhnya batu, lalu riaknya menumbuhkan lingkaran-lingkaran yang kian

sampai ke perguruan tinggi meskipun untuk itu mereka berhemat sampai ke bawah batas minimal kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bahkan penjual sate atau penjual sayur ketengen tidak merasa rendah diri untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Anak-anak muda yang bakal jadi, baik dalam usaha maupun dalam pendidikan, akan senantiasa mendapat dukungan moril dan materiil dari kaum kerabat masing-masing. Secara kuantitatif, berdasarkan persentase jumlah penduduk, suku bangsa Minangkabau diperkirakan mempunyai jumlah sarjana yang terbanyak jika dibandingkan dengan penduduk di daerah lain. Menyekolahkan anak-anak ke perguruan tinggi, selain untuk memperoleh rasa kebanggaan, dapat pula ditafsirkan sebagai "membangkit batang terandam". Artinya, kaum kerabat mereka pada masa lalu juga adalah orang yang bermartabat sama dengan kerabat lain atau tidak kalah dengan kerabat yang lain. Dalam perlombaan memajukan nagari (desa), masing-masing secara kolektif, mereka membangun apa yang telah dibangun orang di nagari lain. Oleh karena itu, setiap nagari mempunyai masjid yang indah, gedung sekolah atau klinik kesehatan, sebagaimana yang dimiliki nagari lain. Pada umumnya gedung-gedung kepentingan umum di desa, seperti sekolah negeri atau klinik kesehatan, dibangun atas swadaya warga masyarakat setempat dengan bantuan kerabat mereka yang merantau di kota. Jumlah bangunan swadaya masyarakat dengan yang dibangun pemerintah seimbang.

Di samping itu, ada perlomba yang bersifat negatif, yang merupakan kegiatan yang mubazir, seperti kegemaran mengadakan kenduri yang besar serta meriah meski untuk hal itu, sebagian harta bendanya akan terjual atau tergadai. Untuk menjaga harga diri agar tidak malu, mereka menjadi pesolek, suka memakai pakaian yang indah-indah dan mahal. Tujuannya, selain untuk melawan dunia orang, juga agar mereka tidak kelihatan kalah dari orang lain dan untuk menyembunyikan kekurangan diri agar tidak kelihatan miskin. Ungkapan Melayu lama yang cukup terkenal mengenai tingkah laku pesolek mereka berbunyi: *Tipu Aceh, gurindam Barus, Lagak Padang, omong Betawi*. Dalam kaba (cerita rakyat) *Rancak di Labuah* dan *Si Bujang Kirai* dilukiskan dengan tepat sekali betapa caranya lagak Padang itu. Persaingan yang didorong perasaan tidak mau kalah dalam melawan dunia orang itu terlihat juga dalam kehidupan rumah tangga mereka. Perempuan-perempuan yang bersaudara, yang menempati kamar di rumah-bersama dengan suami masing-masing, juga saling berlomba. Jika salah seorang suami saudaranya membeli radio, mesin jahit, atau barang-barang lainnya, maka yang lain berusaha pula mendesak suami mereka masing-masing agar membeli barang itu pula. Oleh karena itu, lazim jika pada suatu rumah di Minangkabau mempunyai tiga sampai empat radio, mesin jahit, lampu petromaks, atau benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai lambang peningkatan status sosial mereka.

meluas. Dan lingkaran itu berbaur-bauran dengan lingkaran-lingkaran lain yang dimulai dari titik tempat batu yang lain dijatuhkan. Tiap-tiap anggota kelompok sejak dari yang kecil sampai yang besar menamakan dirinya *awak*.¹⁸ Segalanya bermula dari awak, oleh awak, untuk awak, dan demi awak. Selain awak adalah orang lain yang tidak akan dapat dimasukkan ke dalam lingkaran.

Dalam pemahamannya, maka pengertian awak yang besar akan menuntut siriannya awak-awak yang lebih kecil ke dalam kebersamaan yang komunalitas itu. Individu pun tidak berarti lagi karena ia hanya merupakan satu molekul dari sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu pula, setiap kesulitan, kejayaan atau kepentingan orang seorang, kerabat, kaum, suku kampung atau nagari, bahkan sealam Minangkabau, merupakan kesulitan, kejayaan, dan kepentingan awak pula. Demikian pula sebaliknya, sehubungan dengan itu, pemilikan harus diartikan sebagai pemakaian, selama yang memakai dan yang dipakai itu ada. Artinya, awak yang kecil merupakan bagian yang utuh dari awak yang besar dan awak yang besar merupakan bagian yang utuh pula dari awak yang kecil.¹⁹ Namun, pemahaman lingkungan awak mempunyai batasan yang sesuai dengan struktur masyarakatnya, yang mereka sebut: *Babiliak ketek, babiliak gadang* (berbilik kecil, berbilik besar). Yang artinya, meski semua orang adalah awak, tidak semua orang awak adalah awak. Ukurannya adalah lingkungan masing-masing, mulai di tingkat yang paling kecil sampai ke tingkat yang lebih besar, seperti kerabat terdekat, kerabat jauh, kerabat sekaum, kerabat senagari, dan akhirnya barulah sesama awak Minangkabau.

Dalam pengertian awak *babiliak ketek, babiliak gadang* itu, yang paling dulu disempurnakan ialah awak yang dalam bilik kecil, baik dalam menunjang hidupnya, maupun dalam meminta bantuan serta menyampaikan kesukaran. Meminta bantuan atau menyampaikan kesukaran melampaui batas bilik kecil dipandang tabu karena *maambiak angok ka lua badan* (bernapas ke luar tubuh). Andai seseorang ingin menyampaikan keluhan, ia harus menyampaikannya kepada kerabat terdekat. Kalau kerabat dekat sedang tidak mampu, maka kerabat dekat itulah yang akan menyampaikannya ke bilik besar atau ke kaum kerabat yang berada dalam bilik besar, yakni kerabat yang lingkungannya lebih jauh. Demikian pula halnya dalam memberi bantuan, haruslah kerabat dekat yang menjadi prioritas pertama. Setiap bantuan yang diberikan tanpa diminta atau dalam bentuk yang berlebihan dari kewajiban semestinya dipandang

18 Awak artinya sama dengan *anggota* atau *kita*. Ingat akan istilah *awak kapal*. Istilah *awak* dapat digunakan sebagai kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga tunggal atau jamak dan lazim diikuti kata ganti personalnya, sehingga menjadi *awak den* (saya), *awak ang* atau *awak kau* (kamu), dan *awak nyo* (dia). Dapat pula *awak* diartikan sebagai *kita* atau orang *kita* yang kerabat, yang sekaum, yang senegeri, atau yang se-Minangkabau, seperti lazim dikenal dengan istilah *orang awak*.

19 Lihat juga bab "Penghullu" dan bab "Harta dan Pusaka".

sebagai *mamparagokan gadang bahu* (memamerkan kekuatan bidang bahu), yang artinya memamerkan kekuatan pada karib sendiri.

Awak juga merupakan titik pusat lingkungan kehidupan mereka. Selain awak, ia adalah orang lain. Antara awak dan orang lain ibarat air dan minyak yang dapat berbaur, tetapi tidak serasi. *Rasan aia ka aia, rasan minyak ka minyak* (resam air ke air, resam minyak ke minyak), kata petiti mereka. Bahkan dalam hubungan perkawinan pun, pasangan suami istri tetap seperti air dengan minyak karena sistem perkawinan yang eksogami.²⁰ Dengan demikian berarti bahwa suami atau istri tidak pada tempatnya menceritakan kedukaannya pada pasangannya. Kedukaan hanya boleh disampaikan kepada kerabat masing-masing menurut tali darah yang matrilineal.

Hubungan awak sama awak yang demikian erat senantiasa dapat menghilangkan fungsi hukum formal yang ada dalam masyarakat mereka, jika terjadi pelanggaran atau persengketaan di antara mereka, baik dalam *bilik besar* maupun dalam *bilik kecil*. Lahirlah ungkapan yang cukup terkenal dalam hal ini seperti: *Kabau haji masuak parak haji* (kerbau haji masuk kebun haji), yang maksudnya kalau terjadi perusakan milik awak oleh salah seorang awak, selesaikan saja dengan baik, secara awak sama awak pula.²¹ Lagi pula persengketaan di antara orang bersaudara dikiaskan seperti: *Kusuik bulu ayam* (kusut bulu ayam), yang maksudnya kekusutan yang dapat dilenyapkan hanya dengan barutan tangan.

Rasa dan Periksa

Menurut falsafah mereka, tema *baa di urang, baa di awak* dan *harga diri* menjadi motivasi untuk hidup dalam persaingan yang tajam antara sesama mereka, baik secara individual maupun secara komunal. Persaingan itu bertujuan agar tercapai suatu tingkat yang dapat mengangkat harga diri pribadi dan kaum kerabatnya sebagai yang dimaksudkan dengan *malawan dunia urang*, tetapi dengan nilai keseimbangan yang terjaga bagi harmoni kehidupan masyarakat. Persaingan kelompok masyarakat yang terdiri dari suku-suku sesungguhnya akan dapat menimbulkan perkelahian massal bahkan peperangan. Namun, konflik-konflik fisik dapat dihindarkan karena adanya aturan perkawinan yang mengharuskan perkawinan antarsuku, sebagai salah satu cara menghin-

20 Lihat juga bab "Perkawinan".

21 Menghukum anggota keluarga sendiri bagi memakan buah simalakama, kalau dimakan ibu mati dan kalau tidak dimakan ayah mati. Menjadi suatu dilema hidup, jika pencurian atau skandal yang dilakukan oleh keluarga terhadap keluarga sendiri tidak dapat didamaikan atau disembunyikan dari orang lain. Seberat-berat hukuman bagi pelanggarannya ialah dibuang. (Lihat juga bab "Undang-Undang dan Hukum). Pihak yang dirugikan kejahatan itu biasanya dipersalahkan juga oleh pandangan umum, mengapa ia bisa dirugikan. Kerugian yang menimpanya merupakan kesalahan sendiri, sebab mereka alpa, bodoh, dan sebagainya.

dari konflik itu. Di samping itu, ada sistem kerja kolektif yang dikembangkan, yang tidak terbatas di antara mereka yang sukunya sama. Sistem kolektivitas dikembangkan pada kelompok permukiman, tidak dalam kelompok genetis.²² Hal yang demikian juga merupakan suatu alat untuk menjaga harmoni kehidupan dalam masyarakat mereka.

Ajaran mereka dalam menjaga keseimbangan yang harmonis itu memakai ukuran yang mereka sebut *raso jo pareso* (rasa dengan periksa). Artinya, setiap sesuatu ditimbang dengan ukuran perasaan yang sama dan dengan pemeriksaan yang senilai. Ukuran *raso* atau perasaan ialah rasa sakit dan rasa senang. Untuk rasa sakit mereka memakai ungkapan: *Hukum piciaj jangek, sakik dek awak sakik dek urang* (hukum cubit jangat, sakit bagi kita sakit bagi orang), yang artinya bahwa apabila kulit kita merasa sakit kalau dicubit, orang lain pun akan merasa sakit kalau kulitnya dicubit. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang lain dengan cara dan bentuk apa pun, baik jiwa maupun badannya, selama kita juga akan merasa sakit apabila mendapat perlakuan yang sama. Dalam hal rasa senang, ukuran yang dipakai ialah: *Lamak dek awak, katuju dek urang* (enak bagi kita, suka bagi orang). Artinya, setiap kesenangan yang kita lakukan hendaknya disukai pula oleh orang lain, setidaknya jangan sampai mengganggu orang lain.

Sedang ukuran *pareso* atau periksa akan memakai nilai: *Alur jo patuik* (alur dan patut). Maksudnya, periksalah suatu masalah menurut alur yang lazim, tetapi pertimbangkanlah dengan rasa kepantasan (kepatutan), yang secara sederhana dapat dikatakan periksalah dengan hati nurani sendiri.

Ajaran *raso jo pareso* diungkapkan ke dalam pantun berikut ini:

Kaluak paku kacang balimbiang,
Tumpuruang lenggang-lenggangkan,
Bao manurun ka Saruso.

Anak dipangku kamanakan dibimbiang,
Urang kampuang dipateenggangkan,
Tenggang dengan raso jo pareso.

Keluk paku kacang belimbing,
Tempurung lenggang-lenggangkan,
Bawa menurun ke Saruasa.

Anak dipangku keponakan dibimbing,
Orang kampung ditenggangkan,
Ditenggang dengan rasa dan periksa.

²² Lihat juga bab "Harta dan Pusaka".

Akan tetapi, seandainya dalam keadaan yang memaksa, saat nilai *raso jo pareso* itu tidak mungkin dilaksanakan lagi, orang pun dapat memakai cara lain yang tidak menurut alur yang biasa. Cara itu diungkapkan dengan pemeo: *Awak mandapek, urang indak kailangan* (kita mendapat, orang tidak kehilangan). Artinya, kita dapat berbuat sesuatu yang kita ingini, tetapi orang lain tidak merasa dirugikan. Pemeo ini memang dapat digunakan bagi berbagai keadaan, tetapi maknanya sama dengan *tenggang raso* (*tenggang rasa*), yang nilainya lebih pasif jika dibandingkan dengan ungkapan *raso jo pareso*.

Kesamaan dan Kebersamaan

Sebagaimana alam, yang mereka jadikan guru, yang unsur-unsurnya saling berbeda peranan dan sifatnya, tetapi saling berbaur dalam kedudukan yang sama pentingnya dalam kemestaan, demikian pula susunan masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau adalah suatu kumpulan yang utuh dengan segala keragaman manusia yang saling berbeda kepentingan dan kemampuan serta dengan segala kebaikan dan keburukannya yang akan dapat menimbulkan berbagai kemungkinan, tetapi tidaklah akan sampai saling melemparkan antara sesamanya.

Mereka mempunyai satu motivasi yang kuat untuk hidup dinamis, yakni memelihara harga diri yang tidak terkalahkan atau tidak terendahkan agar tidak memalukan. Untuk itu mereka berlomba dan bersaing secara terus-menerus dalam lingkaran harmoni alamnya. Mereka membentuk keluarga dalam perkawinan, tetapi mereka mempertahankan eksistensi pribadi dalam kaumnya masing-masing. Laki-laki memiliki kekuatan dan kekuasaan, tetapi laki-laki tidak memiliki hak atas harta dan turunan. Mereka hidup *berkampung-kampung*,²³ tetapi mereka membelah dirinya dalam bersuku-suku. Mereka tinggal bersama dalam *rumah gadang* (rumah besar), tetapi mereka hidup berbilik-bilik. Mereka mempunyai kebanggaan kaum secara fanatik, tetapi mereka tidak membesarlu dirinya untuk mengalahkan yang lain.

Bertolak dari pola itu, mereka hidup, berusaha, dan berjuang untuk menghadirkan dirinya sesuai dengan tingkatan yang ada. Meskipun mereka hidup dalam kelompok tingkatan masing-masing, komunalisme mereka demikian kukuhnya. Sebuah pemeo mengungkapkan: *Duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang* (duduk sendirian bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang). Artinya, bila orang hidup menyendir, dunianya akan terasa sempit karena jika terjadi sesuatu yang menyulitkan, tidak ada orang yang dapat diajak berunding, bekerja sama, atau datang membantu. Kalau

23 Arti kampung sesungguhnya ialah *kumpul*, berkampung-kampung berarti berkumpul-kumpul.

hidup bersama-sama tiada kesulitan yang tidak akan dapat diatasi sehingga dunia akan terasa lapang.

Di dalam hidup bersama ini, orang Minangkabau hidup mengelompok, baik dalam sosial, ekonomi, maupun politik dan teritorial. Dalam kelompok hidup sosial, mereka menyusun hidupnya dalam kelompok yang kecil yang terdiri dari orang-orang yang bersaudara serumah, kumpulan orang-orang serumah bersatu dengan saudara-saudaranya yang sedarah di rumah lain. Orang-orang sedarah dari beberapa rumah bersatu dengan semua orang yang sedarah dengan mereka atau senenek moyang dengan mereka, yang mereka namakan kaum atau suku. Meskipun mereka bersatu, persatuan mereka lebih merupakan perserikatan dalam status yang sama. Kesatuan yang lebih besar tidak menguasai kelompok yang lebih kecil. Fungsi kesatuan yang lebih besar lebih cenderung kepada sifat melindungi. Persatuan mereka lebih merupakan persatuan lidi sapu yang diikat sebuah simpai. Bukan persatuan kerikil, pasir, dan semen sehingga menjadi beton. Oleh itulah, orang Minangkabau tidak memakai istilah persatuan dalam tata hidup mereka. Yang mereka gunakan ialah istilah *sama*, dan *bersama*. Jika *sama* dan *bersama* dihimpunkan semua, bukanlah menjadi satu, melainkan mereka sebut menjadi *bulat*.

Dari makna istilah *sama* dapat dikembangkan berbagai pengertian falsafahnya. Orang yang satu adalah *sama* dengan orang yang lain, kampung yang satu *sama* dengan kampung yang lain. Orang yang satu dengan yang lain menjadi *bersama*, bukan bersatu. Demikianlah mereka hidup berkisar dari makna *sama* dan *bersama*. Umpamanya dalam mencari harta sebagai sumber hidup, mereka senantiasa bersama seperti mengerjakan sawah. Walaupun tempat bekerja itu terpisah, sehingga mereka tidak dapat bekerja sama, akan tetapi diartikan sama-sama bekerja atau sama-sama mencari harta. Pengertian keduanya adalah esensial, jika dilihat dari falsafah Minangkabau. Sebab, harta yang digarap bersama atau sama-sama dicari itu pada hakikatnya untuk keperluan kerabat mereka yang sedarah, bukan untuk dirinya sendiri. Selain dari tata ekonomi mereka yang komunalistik, sistem penggarapannya pun secara bersama-sama, yang mereka sebut *bajulo-julo* (berjula-jula). Demikian pula harta benda lainnya, seperti sawah dan ladang serta rumahnya, adalah milik bersama.²⁴

24 Orang Minangkabau, terutama laki-lakinya, didorong agar kuat berusaha mencari harta, bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, juga untuk memperkaya kaum kerabatnya. Kaum perantau dirangsang selalu untuk mengirimkan kekayaannya ke kampung untuk memegang sawah gadai, membuka ladang baru, membangun rumah saudara, bahkan untuk membangun proyek-proyek sosial lainnya seperti masjid, sekolah (madrasah), balairung, atau bangunan kepentingan umum. Dari pola demikian, terlihat kini banyak rumah melebihi keperluan atau bangunan masjid yang indah megah di berbagai desa. Lihat bab "Harta dan Pusaka".

Sebagaimana lazimnya penduduk agraris, mereka hidup saling membantu, bekerja sama, atau bergotong royong, yang polanya ialah: *Barek samo dipikua, ringan samo dijinjing* (yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing). Artinya, segala tugas dan beban yang menjadi kewajiban orang seorang terhadap kepentingan bersama dikerjakan semua orang. Akan tetapi, karena keadaan orang tidak sama, ada yang kaya ada yang tidak kaya, ada yang kuat dan ada yang tidak kuat, maka sistem kerja sama berdasarkan keseimbangan. Yang kaya dan yang kuat akan berkewajiban lebih dari yang lain. Sistem itu disebut: *Gadang kayu, gadang bahannya* (besar batang kayu, besar bahannya).

Bantuan atau pemberian yang diberikan demi kerja sama itu mempunyai pembatasan-pembatasan, seperti pembatasan *gadang kayu gadang bahannya* itu. Apabila seseorang memberikan lebih dari kewajaran, ia akan dikatakan *takanai barangiah* (salah beri), *gadang lagak* (besar lagak), atau mungkin *ado udang di baliak batu* (ada udang di balik batu). Yang artinya, jika seseorang memberi lebih dari kewajaran, mungkin karena ia bodoh atau sok, mungkin juga karena ia mempunyai maksud tertentu di belakang pemberian itu. Pituah mengajarkan *babuek baiak pada-padoi, babuek buruak sakali jan* (berbuat baik agar sepadan, berbuat buruk sekali-kali jangan). Maksudnya ialah agar mereka dalam melakukan kebijakan atau berbuat baik sepadan dengan kemampuannya. Dengan perkataan lain, kebaikan itu ada batasnya. Di samping itu, janganlah melakukan kejahatan apa pun juga. Namun, ajaran mereka pun mengatakan bahwa setiap kebaikan senantiasa menantang imbalan, setiap kebaikan selalu menuntut penggantian. Jika ada seseorang berbuat baik terhadap kita, maka kebaikan itu harus dibalas pada suatu waktu. Demikian pula kita yang berbuat baik, selamanya akan ada imbalannya. Pituah mereka mengatakan bahwa *jariah manantang buliah, rugi manantang labo* (jerih payah menantang imbalan, rugi menantang laba).

Kehidupan bersama tidak berarti kebersamaan serta persamaan secara totalitas. Kebersamaan serta persamaan itu terbatas pada tugas dan hak menurut kodratnya masing-masing dan sesuai dengan norma etik *raso jo pareso*. Artinya, dalam mencapai kebersamaan serta persamaan itu tidak berlaku paksaan dengan kekerasan melainkan terbatas pada tekanan *moral* oleh seluruh pihak, yang puncaknya berbentuk hukuman kucil atau buang.²⁵

Seiya Sekata

Dari rasa persamaan dalam kehidupan bersama yang menyeluruh itu, mereka dituntut suatu aturan permainan yang dinamakan *saiyo sakato* (seia sekata). Dalam kehidupan bersama, dengan hak dan kewajiban yang sama, diperlukan

25 Lihat juga bab "Undang-Undang dan Hukum" serta bab "Penghulu".

suatu kesatuan yang utuh (totalitas). Untuk mencapainya, mereka mempunyai pimpinan yang ditaati secara bulat. Pimpinan itu mempunyai hirarki dan yang tertinggi, yaitu apa yang dinamakan *saiyo sakato* itu. Makna yang dikandung dalam istilah *saiyo* itu disebut *baiyo-iyo* (beriya-iya = berya-ya) dengan pasangannya *batido-tido* (bertidak-tidak), atau *babukan-bukan* (berbukan-bukan), yang lazim diucapkan: *baiyo-iyo batido-tido*. Artinya, bermufakat dengan sungguh-sungguh, bukan asal mufakat, bukan mengiya-iya atau menyatakan persetujuan segala apa yang diputuskan pimpinan mereka. Mamang mereka menyebutkannya dengan:

Kamanakan barajo ka mamak.

Mamak barajo ka panghulu,

Panghulu barajo ka mupakaik.

Mupakaik barajo ka alua jo patuik.

Kemenakan beraja ke mamak,

Mamak beraja ke penghulu,

penghulu beraja ke mufakat,

Mufakat beraja ke alur dan patut.

Maksud mamang itu ialah bahwa pimpinan kemenakan adalah, mamak pimpinan mamak adalah penghulu, pimpinan penghulu adalah mufakat, sedangkan pimpinan mufakat adalah garis hukum dan garis kepatutan atau kepastasan. Meskipun mufakat itu telah menurut garis yang pantas untuk dibicarakan bersama, mufakat itu mempunyai rukun, yakni kebulatan pendapat, sebagaimana yang dimaksud petith: *Bulek aia dek paambuluah, bulek kato dek mugakaik* (bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat). Kebulatan kata itulah yang dimaksud dengan *sakato*, yang dapat ditafsirkan apa yang diungkapkan mamangan dan diperkuat oleh petith itu, bahwa mufakat, yang juga berarti berya-iya, melahirkan kata yang bulat karena orang yang berya-iya itu telah melahirkan kesatuan kata dan juga kesamaan kata. Oleh karena itu, pengertian *kato* di sini, bukanlah merupakan ucapan atau kalimat, melainkan merupakan keputusan mufakat, baik berbentuk peraturan, undang-undang maupun hukum.

Dalam pengertian sosiologis, *seiya-sekata* mempunyai makna homogenitas masyarakat yang berlandaskan kehidupan komunal. Sedangkan dalam pengertian ketatanegaraan, ia mengandung makna demokrasi. Oleh karena itu, rasa persamaan dan kebersamaan lebih tinggi nilainya daripada *seiya-sekata*. *Seiya-sekata* dapat juga timbul karena ada rasa segan untuk menyatakan suatu pendapat yang berbeda dari pendapat umum, sedangkan rasa persamaan dan kebersamaan meletakkan setiap orang pada nilai yang sederajat pada tingkat pertama. Pemahamannya dari sudut pikiran demokrasi, bahwa perbedaan pendapat tidak berarti tidak hendak ikut bersama yang lain. Mamangan

mereka mengatakan tentang perbedaan pendapat itu dengan ungkapan: *Basilang kayu dalam tungku, di sinan nasi mangkonyo masak* (bersilang kayu dalam tungku, di sana nasi makanya masak). Pengertian harfiyahnya, api barulah akan marak dalam tungku apabila ditaruh secara bersilang, tidak tersusun seperti anak korek api dalam kotaknya. Pengertian maknawinya, dalam permusuwaratan atau mufakat diperlukan pikiran yang berbeda, agar masalah dapat dipecahkan dengan semasak-masaknya.

Pola Penyesuaian yang Serasi

Sebagai falsafah yang "berguru ke alam", mereka memandang falsafah Minangkabau sebagai yang *tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh* (takkan lapuk karena hujan, takkan lekang karena panas) karena keabadiannya.²⁶ Keabadian itu bukan karena statis atau beku, melainkan karena kemampuannya menyesuaikan diri dengan keadaan yang senantiasa berubah, sebagaimana alam itu pun senantiasa berubah pula, tetapi harkatnya akan tetap abadi. Proses penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi diungkapkan pepatah: *Sekali aia gadang, sekali tapian barubah* (*Sekali air banjir, sekali tepian berubah*). Maksudnya, apabila banjir besar, tepi sungai tempat mereka mandi akan berpindah atau berubah bentuk, tetapi kehidupan sungai itu akan tetap saja. Sebab, perubahan bukanlah karena satu hal semata. Ada perubahan yang terjadi karena kehendak alam atau kehendak keadaan yang di luar kemampuan manusia, seperti halnya yang dikiaskan pepatah: *Sekali-sekali aia gadang, sekali-sekali tapian barubah* (*sekali-sekali air besar, sekali-sekali tepi berubah*). Perubahan lainnya karena memang harus berubah sebab keperluannya, seperti yang dimaksud mamang: *Usang-usang diperbarui, lapuak-lapuak dikajangi, nan elok dipakai nan buruak dibuang* (*yang usang diperbarui, yang rusak ditatari, yang baik dipakai, yang buruk dibuang*).

Kemampuan dalam penyesuaian diri merupakan seni hidup manusia kalau ia ingin tetap selamat. Seperti halnya yang diungkapkan pantun:

*Kayu pulai di Koto Alam
Batangnya sandi-basandi
Jikok pandai dalam alam
Patah tumbuhan hilang baganti.*

*Kayu pulai di Koto Alam
Batangnya sendi-bersendi*

26 Pepatah ini juga diuraikan dengan ungkapan lain, yakni: "Adat yang sebenarnya adat seumpama adat api menghanguskan, adat air membasahi".

Kalau pandai dalam alam
Patah tumbuh hilang berganti

Pantun itu memberikan pengertian bahwa mereka menafsirkan alam dengan baik. Alam itu terus hidup meski ada yang patah, misalnya pohon, maka ia akan tumbuh terus. Zat alam yang hilang, seperti air dan api, ia akan terus ada. Sikap demikian merupakan sikap mereka yang selalu optimistik, asal mampu menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungannya. Penyesuaian hidup dengan lingkungan itu, juga diungkapkan petitihnya: *Di ma bumi dipijak, di sinan langit di jujuang*. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung). Artinya, di mana pun orang hidup, aturan setempat itulah yang harus dipakai. Namun, bagi mereka hal itu bukanlah merupakan sikap bunglon atau sikap yang tidak berpendirian tetap. Untuk berpendirian tetap itu, terlihat ajaran pada pantun lain, sebagai kelanjutan pantun di atas.

Biriak-biriak tabang ka samak,
Dari samak ka halaman,
Patah sayok tabang baranti,
Basuo di tanah rato.
Dari niniak turun ka mamak,
Dari mamak turun ka kamanakan,
Patah tumbuah ilang baganti,
Pusako lamo baitu juo.²⁷

Birik-birik terbang ke semak
Dari semak ke halaman
Patah sayap terbang berhenti
Bertemu di tanah rata.
Dari ninik turun ke mamak
Dari mamak ke kemenakan
Patah tumbuh hilang berganti
Pusaka lama demikian juga.²⁷



²⁷ Di dalam kiasan yang diungkapkan tambo alam atau seperti yang dilakukan dalam sejarah Minangkabu, terlihatlah betapa kelenturan sikap hidup orang Minangkabu dalam menghadapi kekuasaan dan pengaruh luar. Telah silih berganti kekuasaan feudal otokrasi dan kolonial, seperti Majapahit dan Belanda, menguasai Minangkabu, serta berbagai agama yang pernah mereka anut, seperti Budha, Hindu, dan Islam, tetapi susunan dan falsafah hidup mereka tetap menjadi Minangkabu yang terus-menerus. Sedangkan perubahan itu merupakan bagian luarnya saja, seperti mereka memakai Sarawa Aceh, baju Cino, deta Jao (celana Aceh, baju Cina, destar Jawa). Pakaian tradisional mereka selama ini merupakan cermin kemampuan mengikuti mode atau keadaan, tanpa mengubah pribadinya. Dalam

Ada pemeo yang kiranya dapat menunjukkan secara kongkret betapa orang Minangkabau harus mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitas dirinya atau kebudayaan bangsanya.

Pemeo itu berbunyi: *Paudai duduak, bakisa di lapiak nan salai; pandai bakisa tagak, bakisa di tanah nan sabingkah* (Pandai berkisar duduk, berkisar di tikar yang sehelai; pandai berkisar tegak, berkisar pada tanah yang sebingkah). Maksud pemeo itu bahwa keadaan dapat berubah dan bagi orang yang bijaksana perubahan itu diikutinya tanpa mengubah landasan hidupnya.

Hidup Bertahan dan Mempertahankan Hidup

Falsafah alam Minangkabau menafsirkan kehidupan sebagai suatu dinamika yang mengandung pergeseran dan perubahan secara terus-menerus. Oleh karena itu, setiap manusia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan alam dan lingkungan hidup dengan sesamanya yang merupakan bagian alam. Pola penyesuaian yang serasi ialah menyesuaikan diri dengan keadaan yang lebih baik seperti yang diungkapkan mamang: *Malawan dunia urang* (melawan dunia orang) yang maksudnya menandingi kejayaan orang. Tidak sebaliknya, yakni menyesuaikan diri kepada kehidupan yang lebih rendah. Dari mamang lain yang berbunyi: *Nan gadang jan malenda, nan cadiak jan manjua* (yang besar jangan melanda, yang cerdik jangan menjual), terlihatlah pula bahwa ajaran mereka pada dasarnya mencegah adu kekuatan antara pihak-pihak yang berlomba dalam kejayaan, sebab yang kuat tidak diberi hak untuk melanda pihak yang lemah. Kebesaran dan ketinggian seseorang atau suatu kelompok masyarakat yang bermama kaum atau suku, karena *diambak dan dianjung* bersama-sama oleh sistem masyarakatnya yang komunal.

Namun, mereka juga memahami hukum dialektis yang mereka sebut *bakarano bakajadian* (bersebab berakibat). Sewaktu-waktu akan timbul persengketaan di antara mereka yang tidak dapat diselesaikan. Ajaran mereka memberi pituah:

Adaik badunsanak, dunsanak patahankau.

Adaik bakampuang, kampuang patahankau.

Adaik basuku, suku patahankau.

Adaik banagari, nagari patahankau.

Adat bersaudara, saudara pertahankan,

zaman modern ini, terlihat pula arus kaum intelektual yang berpendidikan Barat atau pesantren, yang semula menghindar dari adat Minangkabau, tetapi akhirnya mereka kembali menjunjung adat nenek moyangnya itu dengan menerima jabatan penghulu adat. Lihat juga lebih lanjut bab "Penghulu".

Adat berkampung, kampung pertahankan.

Adat bersuku, suku pertahankan.

Adat bernegeri, negeri pertahankan.

Sinonim dari pituah itu ialah:

Adaik badusananak mamaga dunsanak,

Adaik bakampuang, mamaga kampuang.

Adaik basuku mamaga suku.

Adaik banagari mamaga nagari.

Adat bersaudara memagar saudara,

Adat berkampung memagar kampung.

Adat bersuku memagar suku.

Adat bernegeri memagar negeri.²⁸

Pengertian *patahankan* (pertahankan) dan *mamaga* (memagar) dapat juga ditafsirkan dengan makna yang berbeda. Yang pertama dapat ditafsirkan sebagai kegiatan yang aktif, sedangkan yang kedua lebih bersifat pasif dalam memelihara keadaan dan atau kedudukan yang sudah dimiliki, baik oleh kaum maupun oleh kelompok hidup mereka secara bersama-sama.

Dalam sikap mempertahankan atau memagar diri dan lingkungannya, pola *babiliak ketek babiliak gadang* (berbilik kecil, berbilik besar) sangat dipegang teguh. Lebih diutamakan ialah sanak saudara, kemudian orang sekampung atau kampung halamannya sendiri. Selanjutnya orang yang sepersukuan atau yang sesama sukunya, karena orang sama sukunya belum tentu sekampung halaman atau senagari. Pada urutan terakhir, barulah lingkungan senagari atau boleh juga senagari itu diartikan dengan setanah air. Sedangkan mempertahankan alam Minangkabau tidak ditemukan dalam ajaran-ajaran mereka.²⁹

28 Kata *adaik* (adat) dalam mamang ini biasa pula diganti dengan kata *tagak* (tegak), tetapi sering pula tidak digunakan. Hal itu tergantung pada pokok pembicaraan yang memerlukan dukungan mamang itu. Hal itu disebabkan arti kata adat itu banyak dan luas sekali. Lihat juga bab "Undang-Undang dan Hukum" serta bab "Kesusastraan".

29 Hal ini dapat ditinjau dari berbagai sudut dan dari serba kemungkinan, antara lain mungkin Minangkabau secara keseluruhan tidak merupakan suatu kekuasaan pemerintahan atau kerajaan. Ia hanya merupakan suatu kesatuan ajaran atau pemahaman. Yang merupakan suatu pemerintahan ialah nagari. Hubungan antara nagari dan nagari ialah hubungan karena kesatuan ajaran, sedangkan kedudukan antara sesamanya adalah sederajat. Dalam sejarahnya yang telah panjang, terlihat bahwa berbagai kerajaan telah mencoba menguasai Minangkabau, seperti Kerajaan Majapahit mengirim Aditiawarman atau Kerajaan Belanda

Sasaran dalam mempertahankan kehidupan lingkungan pada batas-batas tingkatannya yang bersifat aktif itu ialah *malawan dunia urang* (melawan dunia orang) agar kadar kedudukan mereka atau kedudukan seseorang dari mereka sama dengan yang lain. Sedangkan dalam posisi *mamaga* (memagar) sifatnya berjaga-jaga agar mereka, baik lahir maupun batin, tidak menjadi lebih rendah dari yang lain. Bentuk sikap mempertahankan dan memagari itu menuntut kebersamaan yang hampir secara total, sehingga tidak seorang pun yang tidak ikut serta, sesuai dengan *gadang kayu*, *gadang bahanyo* (besar pohon, besar bahannya), yang artinya bahwa partisipasi masing-masing sesuai dengan kemampuannya.

yang datang kemudian. Penaklukan Aditiawarman sebagai wakil Majapahit pada dasarnya tidaklah mengubah sistem pemerintahan Minangkabau. Meskipun kemudian dikenal orang Kerajaan Pagaruyung, pengaruh kerajaan itu tidak terlihat dalam alam kebudayaan Minangkabau sendiri. Sehingga Kerajaan Pagaruyung seolah dipandang sebagai bentuk pemerintahan suatu nagari yang berada di luar hukum Minangkabau yang wilayahnya berada pada Kabupaten Tanah Datar dewasa ini saja. Dengan penaklukan Kerajaan Pagaruyung pada abad ke-19 Belanda menafsirkan secara *de jure* telah menaklukkan seluruh wilayah Minangkabau. Padahal, peperangan rakyat Minangkabau menentang Kerajaan Belanda yang menyerang mereka masih terus hingga awal abad ke-20. Sistem mempertahankan lingkungan yang terdekat pada tingkat utama terlihat pada sifat peperangan rakyat Minangkabau melawan Kerajaan Belanda seperti yang terlihat dalam Perang Paderi, yaitu tiap nagari melakukan perlawanan sendiri dan atau dengan bantuan nagari tetangganya, sehingga tidak terlihat bentuk peperangan menyeluruh pada suatu saat yang sama. Dari sejarah itulah, di Minangkabau terkenal adanya Perang Kamang, Perang Manggopoh, dan lain-lainnya, serta yang terakhir Perang Silungkang, yang semuanya merupakan peperangan lokal secara militer. Namun, pada dasarnya hal itu merupakan perang rakyat Minangkabau seumumnya, jika dilihat dari sudut ajaran falsafahnya yang menentang kekuasaan asing. (Lihat juga bab "Sejarah").

Mungkin pula penonjolan nagari sebagai suatu kesatuan menjadi lebih penting akibat terjadinya pertenturan-pertenturan dengan ajaran atau kekuatan, seperti Islam dan kemudian kekuatan Belanda yang tentu saja lebih menyukai perpecahan masyarakat Minangkabau. Dalam hal pertenturan dengan ajaran Islam, umpamanya, penyebabnya adalah datangnya berbagai aliran yang saling bertentangan, seperti antara kaum Syiah dan kaum Sunnah dan kemudian antara keduanya dengan paham Wahabi yang keras. Tiap aliran menguasai beberapa nagari, sehingga antara nagari yang menganut aliran yang saling berbeda itu, terjadi permusuhan karena masing-masing sangat fanatik terhadap alirannya sendiri. Secara Minangkabau, meskipun tiap-tiap nagari mempunyai berbagai varian dalam pelaksanaan berbagai upacara adatnya, tidaklah pernah dapat dibuktikan dalam sejarah bahwa telah terjadi peperangan antara nagari karena varian itu. Umpamanya pengaruh Kerajaan Aceh di pesisir yang cukup lama telah memperkenalkan sistem patriarchat, seperti terlihat pada gelar yang diwariskan ayah kepada anak, tidaklah menyebabkan nagari bagian darat menjadi sakit hati karena perubahan itu. Meskipun di wilayah pesisir ini mereka sangat fanatik mempertahankan warisan patriarchat yang diperkenalkan Kerajaan Aceh ini, mereka itu hingga kini tetap memakai ajaran Minangkabau sebagai falsafah hidupnya. Lihat juga bab "Penghulu" dan bab "Perkawinan".

Pemahaman bebas dari kewajiban itu hampir boleh dikatakan tidak ada, karena alasan harga diri dan rasa persamaan. Oleh karena itu, bagi yang betul-betul tidak mampu, pituah mereka mengatakan: *Tak aia talang dipancuang, tak kayu jenjang dikapiang* (tidak ada air talang dipancung, tidak ada kayu jenjang dikeping), yang maknanya usahakan bagaimanapun caranya, walau akan bersusah payah atau menggadaikan harta. Namun, apabila dengan cara demikian juga tidak mungkin, pituah mereka mengatakan: *Tak lalu dandang diaia, di gunun ditanjakkan juo* (tak lalu biduk di air, di gunun tanjukkan juga). Artinya, jika usaha gagal dengan jalan yang biasa, ambilah jalan yang tidak biasa. Jika jalan yang biasa itu merupakan sesuatu yang tidak baik, pandai-pandailah menyembunyikannya agar kerabat tidak mendapat malu. Kata ajarannya: *Jikok mamakan habih-habih, jikok manyuruak ilang-ilang* (jika memakan betul-betul habis, jika bersembunyi betul-betul hilang), karena kalau tidak sampai habis atau sampai hilang, nanti akan ketahuan orang lain.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Gaffar. "Sebuah Tinjauan tentang Arsitektur Minangkabau", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Abdul Samad Idris, Datok. *Hubungan Minangkabau dengan Negeri Sembilan dari Segi Sejarah dan Kebudayaan*, Seremban, Pustaka Azaz Negeri, 1970.
- Alfian. "Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian", *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, Jakarta, LP3ES, 1979.
- Arby Samah. *Seni Ukir Tradisional Minangkabau*, arsip Bidang Kesenian Kantor Wilayah Dep. P. dan K. Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Asmaniar Z. Idris. "Kerajaan Minangkabau Pagaruyung" Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Bahar Dt. Nagari Basa. *Falsafah Pakaian Penghulu*, Payakumbuh, Eleonora, 1966.
- Bahar Dt. Nagari Basa. *Tambo dan Silsilah Adat Alam Minangkabau*, Payakumbuh, Eleonora, 1966.
- Bank Nasional 40 Tahun, Bukittinggi, 1970.
- Batuah, A. Dt. dan A. Dt. Madjoindo. *Tambo Minangkabau*, Jakarta, Balai Pustaka, 1957.
- Batuah Sango, Dt. *Tambo Alam Minangkabau*, Payakumbuh, Limbago, 1954.
- Berg, C.C. *Lintasan Sejarah Majapahit, Indonesia* 1952
- Boechari. *An old-Malay Inscription of Sriwijaya at Palas Pasemah (South Lampung)*,

- Praseminar Penelitian Sriwijaya. Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. Jakarta, 1979.
- Boestanul Arifin Adam. "Musik Tradisional Minangkabau", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau* di Batusangkar, 1970.
- Chidir Ali. *Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1972.
- Daramin Dt. Madjo Indo nan Gadang. "Kedudukan Sungai Jambu di tengah Lembaga Adat Minangkabau", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau* di Batusangkar, 1970.
- Darwas, D. Dt. Rajo Malano. *Filsafat Adat Minangkabau*, Yayasan Lembaga Studi Minangkabau.
- Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro. *Seluk Beluk Adat Minangkabau*, Bukittinggi, Nusantara, 1965.
- Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Tengah. *Propinsi Sumatera Tengah*, Bukittinggi, 1955.
- Edwar Djamaris. "Tambo Minangkabau, Tinjauan Struktural", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi 1980.
- Ensiklopedia Indonesia*. Bandung — 's-Gravehage, W. Van Hoeve.
- Ensiklopedi Indonesia (I)*. Jakarta, ichtiar Baru-Van Hoeve, 1980.
- Gazalba."Pokok-Pokok Pikiran tentang Konflik dan Penyesuaian Antara Adat, Agama, dan Pengaruh Barat", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Islam di Minangkabau*, Padang, 1969.
- Gunawan, I. dan J. Banunaek. "Peranan Faktor Sosial-Budaya dalam Gangguan-Gangguan Jiwa pada Orang Minangkabau", *Djiwa*, I, 1968.
- Hamka. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Jakarta, Fa. Tekad, 1963.
- Hamka. *Ajahku*, Jakarta, Djajamurni, 1960.
- Hamka. *Antara Fakta dan Khayal 'Tuanku Rao'*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- Hamka. *Sejarah Islam di Sumatera*, Medan, Pustaka Nasional, 1950.
- Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup I* Jakarta, Bulan Bintang, 1979.
- Hamka. *Tenggelamnya Kapal van der Wijck*, Bukittinggi, Nusantara, 1966.
- Hanafiah S.M, A.M. *Tinjauan Adat Minangkabau*, Jakarta, 1970.
- Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Islam di Minangkabau*, Padang, 1969.
- Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Himpunan Makalah Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan Minangkabau*, Bukittinggi, 1980.
- Hurgronje, Snouck C. *De Atjehers*, Leiden, E.J. Brill, 1893.
- Hurgronje, Snouck C. *Islam di Hindia Belanda*, Jakarta, Bhratara, 1973.
- Ibenzani Usman. "Seni Ukir Tradisional Minangkabau dalam Konteks Adat

- Istiadat", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Iskandar Kemal. "Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies Press.
- Ismail Suny. *Bunga Rampai tentang Aceh*, Jakarta, Bhratara, 1980.
- Jahja. "Hukum Waris dan Tanah dan Praktek-Praktek Pengadilan", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies Press.
- Januir Khalifah St. Indera. "Sejarah Kerajaan Inderapura". *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Johns, A.H. *The Kaba Rantjak Dilabueh: A Specimen of Traditional Literature of Central Sumatra*, Ithaca, N.Y, Cornell University, 1958.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Jambatan, 1971.
- Madjelis Tahkim. *Adat Contra Islam*, Mosi Besar Partij Sjarikat Islam Indonesia, 1934.
- Mahmoed, St. BA. dan A. Manan Rajo Pangulu. *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*, tanpa penerbit dan tanpa tahun.
- Mahmud Junus. *Sejarah Islam di Minangkabau (Sumatra Barat)*, Jakarta, Al Hidayah, 1971.
- Mansoer, M.D., dkk. *Sedjarah Minangkabau*, Jakarta, Bhratara, 1970.
- Maruhum Batuah, A.M. Dt. dan H. Dt. Bagindo Tanameh. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta, Pustaka Aseli, 1956.
- Mattulada. "Minangkabau dalam Kebudayaan Orang Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Miral Manan. *Aturan Alam: Mengenal Kembali Adat Alam Minangkabau*. (stensilan).
- Mochtar Naim. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies, 1968.
- Mochtar Naim. *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1979.
- Moens, J.L. *Buddhisme di Jawa dan Sumatra dalam Masa Kejayaan Terakhir*, Jakarta, Bhratara, 1974.
- Moens, J.L. *Crivijaya, Yava en Kataha*, TBG LXXVII, 1937.
- Mohammad Hasbi. "Talikerabat-Talikerabat pada Kekerabatan Orang Minangkabau", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Mohammad Said. "Sejarah Minangkabau dengan meminjam dan memper-

- gunakan Karya Penulis Asing", Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Mohammad Sjafei. *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta, CSIS, 1979.
- Mohammad Zain, St. Kamus Modern Bahasa Indonesia, Jakarta, Grafica .
- Muhammad Amir. *Bunga Rampai*, Medan, 1938.
- Muhammad Radjab. "Kesusasteraan Kaba di Minangkabau", Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Muhammad Radjab. *Perang Paderi*, Jakarta, Balai Pustaka, 1954.
- Muhammad Radjab. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies, 1969.
- Muhammad Radjab. *Tjatahan di Sumatera*, Jakarta, Balai Pustaka, 1949.
- Muhammad Yamin. *Atlas Sedjarah*, Jakarta, Djambatan, 1956.
- Muhammad Yamin. *Gajah Mada*, Jakarta, Balai Pustaka, 1977.
- Muhammad Yamin. *6000 Tahun Sang Saka Merah Putih*, Jakarta, Balai Pustaka, 1956.
- Muluk Nasution, A. *Pemberontakan Rakyat Silungkang, Sumatera Barat 1926-1927*, Jakarta, Mutiara, 1981.
- Nasroen, M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta, Bulan Bintang, 1971.
- Navis, A.A. "Korelasi Agama Islam dan Adat Minangkabau dalam Pembangunan", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Islam di Minangkabau*, Padang, 1969.
- Navis, A.A. "Sastra tradisional Minangkabau", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Padang, 1970.
- Navis, A.A. "Meninjau Masalah Adat Minangkabau dalam Novel Indonesia" *Budaya Jaya*, No. 99/1976.
- Navis, A.A. "Kaba: Cerita Rakyat Minangkabau", Pertemuan Sastrawan Nusantara III, Kuala Lumpur, 1981.
- Navis, A.A. "Sekitar Kesenian Minangkabau Tradisional" Pertemuan Seniman se-Sumatera Barat, Padang, 1981.
- Navis, A.A. "Tingkah laku Gerakan Politik di Sumatra Barat" Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Nooteboom, C. *Sumatra dan Pelayaran di Samudera Hindia*, Jakarta, Bhratara, 1972.
- Optimis, Majalah no. 25/Februari 1982.
- Pitono Hardjowardojo, R. *Adityawarman*, Jakarta, Bhratara, 1966.
- Purbatjaraka, R. NG. *Riwayat Indonesia I, Jajasan Pembangunan*, 1952.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.
- Rasjid Manggis, M. Dt. Radjo Panghoeloe, *Minangkabau, Sedjarah Ringkas dan Adatnya*, Padang, Sri Dharma, 1971.

- Rusli Amran. *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*, Jakarta, Sinar Harapan, 1981.
- Sangguno Diradjo, Dt. Tambo Alam Minangkabau, Jakarta, Balai Pustaka, 1954.
- Sanusi Pane. *Sejarah Indonesia II*, Jakarta, Balai Pustaka, 1965.
- Schriek, B.J.O. *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*, Jakarta, Bhratara, 1973.
- Slamet Muljana. *Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi*, Jakarta, Idayu, 1981.
- Slamet Muljana. *Nagarakertagama dan Tafsir Sejarahnya*, Jakarta, Bhratara, 1979.
- Soekmono. "Sekali Lagi tentang Lokasi Sriwijaya", *Praseminar Penelitian Sriwijaya*, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, Jakarta, 1979.
- Soekmono. "Tinjauan Sejarah Kuno Minangkabau Berdasarkan Peninggalan Purbakala", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Stoddard, L. *Dunia Baru Islam*, Jakarta, Pembangunan, 1979.
- Sjafnir Abu Nain, "Pakaian Adat Minangkabau", Seminar Internasional Mengenai Kesusastraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Toorn, J.L. van der. *Aanteekeningen uit het Familieeven bij den Maleier in de Padangsche Bovenlanden I & II*, 1817.
- Umar Junus. "Kaba dan Sistem Sosial Minangkabau: Suatu Problem", Seminar Internasional Mengenai Kesusastraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Syed Ameer Ali, *Api Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978.
- Wojowasito, S. *Kamus Kawi — Indonesia*, CV. Pengarang.
- Zuber Usman. "Fungsi dan Peranan Bahasa dan Sastra Minang dalam Kebudayaan Lokal maupun Nasional", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Zuber Usman. *Kesusasteraan Lama Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, 1957.
- Zuber Usman. "Orang Talang Mamak", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.

Indeks

A

Abbasiyah, Dinasti 25
Abdul, Muhammad 40, 42
Abdurrauf, Syekh 27
Aceh 22, 23, 25–7
adaik babuhua sentak 87
Aditiawarman 11, 14–6
adok 273
Agam, *lukuk* 31, 33–5, 48, 105, 134
Ahmad, Haji Abdullah 39, 40, 42
Ahmadsyah, Sultan 18
aka 97
Alahan Panjang, *nagari* 31, 33, 35, 37
Alam Minangkabau 59
Alamsyah, Sultan Bagagar 20, 23
Alamsyah, Sultan Muning 20, 31
alam takambang jadi guru 59, 69, 264
Ali, Khatib 42
Alif, Maharaja 46
Alif, Raja 18
Alif, Sultan 17, 18, 26
Aluang Bunian Koto Piliang 57
Amboin 22
Amoghapasa, *arca* 11, 15, 26
Amrullah, Haji Abdul Karim 39, 42
anak silek 265
Ananggawarman 16
Andalas 35
Andomo 24
Andomo di Saruaso 57
Anesecritus 4
Anggang nan Datang dari Lauik 50
angku-angku, *golongan* 264, 283
Anjing yang Mualim 47
aratu gantuang 153
Argyre *lihat* Kota Perak
Aryadamar *lihat* Aditiawarman
Arya Wangsadiraja *lihat* Aditiawarman
As-Salib, Sultan Malik 25
Aur, Tuanku Lubuk 31
Aziz, Khalifah Umar bin Abdul 25

B

babiliyah *ketek babiliaq gadang* 71, 81
badikaa 274
Bagagarsyah, Sultan Alam 20, 31, 34
bagindo 108, 133
bajulo-julo 75
bakarauo bakajadian 60, 80, 172
bak pituah urang tuo-tuo 260
balah bubuang 174
balairung 188, 189, 252, 255
Balaputra 8
Balun, Sutan 50
Bandang, Dato Ri 28
Bandaro di Sungai Tarab 57, 58
Bangkinang 3
Bank Nasional 43
bansi 279, 281
Banten 21
Banuhampu, suku 122, 129
Bapak Wartawan Melayu 41
Barapi, Tuanku 31
Barus 15, 24, 25, 27
Basa Empat Balai 17, 31, 57
basandiang 204
baso-basi 262
Basyah, Sentot Ali 34
batagak gadang 146
Batanghari, *sungai* 6, 10, 15, 16, 18, 37
Batangkampar, *sungai* 7, 15, 18
Batavia *lihat* Jakarta
batimbang tando 199
Batipuh, *nagari* 17, 36, 58
Batu Batikam 55, 56
Batusangkar 33, 37
Batutah, Ibnu 26
Bendahara di Kampar 58
Bendang, suku 129
Biaro, Tuanku 31
Bodi Caniago 54–7, 92, 123–5, 178
Bodi Caniago, *kelarasan* 129, 144, 188
Bonjol, Tuanku Imam 31, 34, 36

buang 115
Bukittinggi 34, 35, 37
Bunda Kandung 46, 50, 51
Bungsu, Tuan lihat Aditiawarman
Buo, kerajaan 17, 19, 28, 35, 37, 57
Burhanuddin, Syekh 26, 27

C

Camin Taruik Koto Piliang 58
Candung 31
Canking, nagari 27-9, 31, 38
Cati Bilang Pandai 46, 47, 50-2, 54, 57, 250
catur rakrian 16
cemo 112
Cianjur 36, 37
Cindur Mato 51, 249, 273, 275
Cingkuk, pulau 23
cino buto 198
Cola, kerajaan 9, 10
Cuci, suku 123
cultuur stelsel 37
Cumati Koto Piliang 58
cupak 90
cupak diisi limbago dituang 128

D

Dalima, suku 124
Dalu-dalu 36
dampeang 268
Dang Tuanku lihat Rumandung, Sutan
darmajaksa yang berdua 16
Darmasraya 10-2, 26
Datuk Bandaro 31
Datuk Batuah, Haji 42
Datuk Ketumanggungan 46, 50, 51, 54, 57,
92, 122, 175, 250
Datuk nan Sakelap Dunia 122, 123, 129, 175
Datuk Perpatih nan Sabatang 16, 26, 46, 50,
51, 54, 57, 92, 122, 175, 250
Datuk Sutan Maharaja 41, 42
debus , 278, 280
Depang, Maharaja 47
detia saluak 107
Dewa Tuhan Prapatih 16
Diaz, Thomas 19
Digul 43
Diniyah Putri 282

Diniyah School 40, 42
dipatuan 18
Diponegoro, Pangeran 33, 34
dubalang 106
dusun 94

E

Enggano, pulau 21

F

Fansuri, Syekh Hamzah 27
Fort de Kock 37
Fort van der Capellen 33, 37

G

gadang 134, 143
Gadang, Tuan 36, 37
gadang bagilia 144, 145
gadang kayu gadang bahannyo 76, 82
gadang lagak 76
Gadang nan Batujuah 17, 58
Gadih, Tuan 20
Gadis, Tuan 31, 32
gadis gadang 210
gadis gaek 210
Gajah Mada 12, 14-6, 26
gajah maharam 174, 175
Gajah Tongga Koto Piliang 58
galauggang 190
Gama, Vasco da 21
gambus 282
Gandhara 5
ganti lapik 198
Goa, Raja 28
golden khersonese 4
gomtek pucuak 209
Gresik 21
Gudam, suku 123
Guguk Sigandang 35
Galung Tuanku 31
Gunung, nagari 32

H

habib adaik bakarelaan 140
Harimau Campa 47

Harimau Campa Koto Piliang 58
Harimau nan Salapan 31
Hayam Wuruk 15, 16
hereaunggendang 262
Hikayat Raja-Raja Pase 26
hinggok mancakam tabang manumpu 128
hutan lalch 151

I

Ilalang 24
Ilappai 27
indang 278, 280, 282
Indragiri, kerajaan 17
Indrapura 15, 17, 18, 23
Indraswari *lihat* Petak Dara
INS Kayutanam 43, 282
Islam
masuk Aceh 26
masuk Filipina Selatan 26
masuk Sulawesi Selatan 28
menyebar di Sumatera Barat 26-8
Ismail, Syekh 38, 41

J

Jabadicu *lihat* Jawadwipa
Jakarta 18, 32-4
Jalito, Indah 50
Jambak, suku 122, 123, 129
Jambek, Haji Jamil 39
Jamilan, Puti 50
janang 253, 268
jariah manantang buliah 155
Jawadwipa 4
Jayakatwang 11
Jayanagara 11, 14, 15
Jayawisnuwardani 15
Jingga, Dara 11
Juliah, Indah 50
julo-julo 154

K

kaba 243, 244, 251, 252, 265, 272, 273, 276
kabau haji masuak parak haji 72
cabuang batang 209
kahuripan 15

Kamang, *nagari* 31, 33, 5, 37
Kambing Hutan 47
Kampai, suku 130.
Kantoli *lihat* Kuntala, kerajaan
Kapau, *nagari* 33
Kapau, Tuanku 31
Katiagan 33
kato 98, 99
kato malcreang 262
kato marandah 207
kato nan ampek 230
kawin wakil 198
Kerinci 3
Kertanegara, Raja 10-2.
ketek banamo gadang bagala 132
Khaidir, Nabi 18
Khalifatullah, Sultan 18
Khatib, Syekh Ahmad 39, 41, 42
Kubuang Tigo Baleh, luhak *lihat* Solok, kabupaten
Kucing Siam 47
Kuntala, kerajaan 5, 6
Kuntu, kerajaan 15, 26
kurenah kato 100
kusuk bulu ayam 72
Kuti, Pemberontakan 14
Kutianyir, suku 122, 125, 129

L

Lagundi *nan Baselo* 48, 50
lambang urok 209
Lamuri 25
langgam kato 101
lanjar 177, 179, 180
lareh 55, 56
lareh nan duo 55
Lawas, Tuanku Ladang 31
Lelo, Tuanku 31
Lho Semawe 25
Lima Kaum, *nagari* 55
Limo Puluh Koto, luhak 33-5, 48, 105
Lintau, Tuanku 29-31, 33, 34
lipiek pandan 174
Lokitawarman, Sri Maharaja 24
Luar, Tuanku Padang 31
Lubuk Alung 37
Lubuk Ambalau 34
Lufti, Mochtar 43

- luhak 104, 105, 229
 luhak naan tiga 107, 123
- M**
- M**adagascar 3, 24
 Madrasah Irsyadunnas 282
maelo kayu 182
 Maharaja Basa *lihat* Datuk Ketumanggungan
 Mahat, kampung 7
 Majapahit, kerajaan 11, 13
 ekspedisi ke Pase 26
 sistem pemerintahan 16, 17
 Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) 43
 Makassar 22
 Malaei Colon 5
 Malaka, kota 21
 Malaka, Tan 42
malakok 150
malam bainai 201
malawan dunia urang 62, 69, 72, 80, 82
 Malayapura 10, 15
 Maluku 21
mamaga 81, 82
mamak 130, 131
mamak kepalo alek 253-5
mancatah tiang tua 182
 Mandahiling, suku 122, 125, 129
Manggopoh 37
 Mangkudum di sumanik 57
menjalang 203, 206
 Mansiangan, Tuanku 29-31, 33, 35
manti 106
mantri katrini 16
marah 108, 133
 Marapalam, bukit 33
marapulai 199-208, 269
 Mataram, kerajaan 8
 Matur, *nagari* 34, 35
 Mauliawarmadewa *lihat* Aditiawarman
Mauliawarman 10, 12
 Melayu, suku 122-5, 129
 Merapi, gunung 26, 27, 33, 48, 104
 Meurah Silu *lihat* As-Salib, Sultan Malik
Minang 52
 Minangkabau
 adat 88-90, 179-81
- aktivis muda 42, 43
 asal usul nama 52, 53
 aspek perekonomian 149, 150, 153-6
 aspek wilayah 53, 104, 105, 151-3
 dikuasai Belanda 34, 36
 dikuasai kaum Paderi 32
 etika hidup 65-8, 72, 73, 76
 filsafat alam 59, 60, 78, 79, 255, 256
 filsafat manusia 61-5, 69, 80-3, 95-8, 179, 257, 258
 gaya bahasa 98-104, 229-31, 246, 247
 gelar 130-5
 gerakan politik Islam 41, 42
 hasutan komunis 38
 hukum adat 112-8
 kebudayaan lisan 45, 46
 kekerabatan 221-8
 kesenian 281, 282
 masuknya Islam 26-8, 30
 menentang rodi 37
 perang saudara 18-20, 23
 pembaharuan ajaran Islam 38-42
 pengaruh asing 263, 264, 281, 282
 perdagangan masa VOC 18, 19, 22, 23, 32
 perlawan terhadap Belanda 23, 24, 34-7
 sistem kemasyarakatan 69-72, 74-8, 106-9, 119, 120, 130, 258
 sistem kesukuan 121-7, 129, 130
 sistem pemerintahan 54-8, 94, 105, 106
 sistem pendidikan Islam 40
 undang-undang 91-3, 109-12
 warisan 158-65
- Miskin, Haji 29, 30
 Moro 26
 Muara Panas 37
 Muaratakus, candi 7, 10
 Muawiyah, Khalifah 24
 Muda, Iskandar 23
 Muhammadiyah 43
 Muhammadsyah, Sultan 18, 23
 Muko-Muko 18
 Musi, sungai 7, 8, 10
- N**
- N**agari
 Nambi, Pemberontakan 14
nan Tuingga Magek Jabang 274
 Napoleon, Perang 20

nikah ganggang 197
nunik nan batigo 57

O

Ophir, gunung 3
Orang nan Empat 29

P

Padang 23, 24, 31, 32, 133, 201
Padang Candi 15
Padang Ganting, *nagari* 57
Padang Sibusuk 16, 17
Padangpanjang 36, 48
Paderi
 menguasai Minangkabau 32
 pembersihan umat Islam 29, 32, 38
 perlawanan terhadap Belanda 33-6
Pagaruyung, kerajaan 10, 15, 16, 18-20, 23, 24,
 46, 50, 57, 91, 107, 123
 dikuasai kaum Paderi 32
 masuknya Islam 26
 pusat kerajaan 31
 sistem pemerintahan 17, 28, 29
panca ring wilwatika 16
Painan, Perjanjian 23
palambok talabuah 147
Palembayan 34
panacah tubo 67
Pamaluyu, Ekspedisi 10
Pamuncak Koto Piliang 57, 58
pananti 201
Pandai Sikat 29, 30, 33
pandek 265, 266
panibo 200, 201
paningkah 280
Pantar 35
panungkek 135, 143
Perdamaian Koto Piliang 58
parewa, golongan 264, 281, 283
Pariaman 23, 33, 133
Pariaman Tiku 108
Pariangan 27, 48
Partai Nasional Indonesia (PNI) 43
Pasak Kungkuang Koto Piliang 58
Pasaman 31, 33, 34
Pasaman, Tuanku lihat Lintau, Tuanku
Pase 25, 26

patahankau 81
Patapang, suku 122, 129
Pauh 23, 24, 37
pegang gadai 165
Pelita Kecil 41
Pemedanan 189
penghulu
 gelar 132-5
 jabatan 131, 136, 138, 139, 143-5
 pakaian 142, 143
 pantangan 140-2
 pidato penobatan 253, 254
 upacara penobatan 145-7
penghulu pucuk 94
penghulu suku 106
perkawinan
 aspek sosial 210, 211, 213-9
 hukum 195-7
 mahar 200, 201
 peminangan 199, 200
 perjamuan 209
 pola 193-5
 tata-cara 197-9, 203-8, 269

Persatuan Dagang Indonesia (Persdi) 43
Persatuan Guru Agama 42
Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) 43
Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 43
Persatuan Ullama Sumatera 42
perut 106
Petak, Dara 11
Pinawan, suku 123
Piobang, Haji 29
plakat panjang 35
Polo, Marco 25
Pono lihat Burhanuddin, Syekh
Prasasti Kedudukan Bukit 7
Ptolomeus, Claudius 4, 5
pulang ke mamak 194
puiggawa 106
pupuk batang padi 268-70, 279
Puro Panuah Koto Piliang 57
pusako 158, 160
pusako batolong 226
pusako rendah 162
putuhi 117

R

Rachias 4
Raffles, Thomas Stamford 20

- Raja Adat 28, 57
 Raja Alam 57
Raja Dua Sela 17
 Raja Hitam 37
 Raja Ibadat 28, 57
 Raja Muda 58
 Raja Putih 24
 Rajakacik 58
 Rajapatni 15
Raja Tiga Sila 17, 19, 28, 57
rajo babandiang 107, 175, 176
rang mudo 208
 Rangga Lawe, Pemberontakan 14
rangkiang 187
 rantau 104, 105, 107, 108
 Rao 34
raso jo pareso 73, 74, 76, 196
 Rasyod, Syahbilal 43
 rebana 280, 282
regent 36, 37
 renah, Tuanku nan 29, 30, 33
 Rokan, *sungai* 15
 ruang 174, 177
 Ruhum 46
rumah baanjuang 175, 176
rumah batingkok 175
rumah gadang
 arsitektur 172
 aspek kekerabatan 223-6
 fungsi sosial 176-81
 jenis 174, 175, 188, 189
 motif hiasan 183-6
 tata cara pendirian 181-3
 Rumandung, Sutan 50, 51
Ruso nan Datang dari Lauik lihat Datuk Ketumanggungan
- S**
- Sabak 24
 Sadeng, Pemberontakan 13
saduo 155, 156
 Saidi, Anwar St. 43
 Sailendra 8
saiyo sakato 76, 77
 sako 158, 160
salawat dulang 282
 Salo; suku 129
salung 275, 279, 281
- sanak sudaro* 230
sandaro 166
 Sang Dewaraya lihat Aditiawarman
 Sanggaramawijaya, Sri Maharaja 10
 Saningbakar, *nagari* 58, 273, 275, 276
saparuik 223, 224
saptapatri 17
 Sarekat Dagang Islam 42
 Sarekat Usaha 42
 Sarikat Adat Alam Minangkabau (SAAM) 42
 Sarikat Islam 42, 43
 Saruaso, *nagari* 17, 18, 24, 57
 sarasan 190
 Sekolah Adabiyah 40, 42
 Sewatang, Patih 26
si tinjau laiuk 107, 174, 176
sidi 108
 Siguntur 10, 15
 Sijangek 53
sijobang 274
 Sijunjung 31, 37
silat lintau 266
silat pauh 266
silek 174
 Silungkang, *nagari* 38, 42, 58
 Simabur, *nagari* 32
 Simabur, Tuanku lihat Ismail, Syekh
 Simawang 20, 31, 32, 34, 58
 Simpuriuk 52
sinidia 262
 Singasari lihat Majapahit
 Singkarak, *danau* 20
 Singkawang lihat Singkuang
 Singkuang, suku 122, 125, 129
 Sintuk 18, 27
 Sipisang 34, 35
sirih dalam carano 128
sitaraluk 266
 salo, suku 122
 sofinisme 41
 Solok, kabupaten 34, 36, 37, 105
 Sri Maharaja Diraja 10, 20, 25, 46, 50, 53, 54
 Sriwijaya, kerajaan 6, 8, 10, 24, 25
suarang 165
 Sukarno 43
Sulit Air *nagari* 58
 Suluhan Bendeng Koto Piliang 58
 Sumanik, *nagari* 17, 29, 57
 Sumatera Thawalib 41-3

Sumpah Palapa 13
Sumpur Kudus 17, 28, 57
Sungai Jambu, *nagari* 58
Sungai Pagu 37
Sungai Puar 34, 35
Sungai Tarab 17, 24, 57, 58
surambi papek 107, 175, 176, 179
Suran, Putri 18
surau 189
surau, *golongan* 264, 283
Suri Dirajo 50
sutan 108
Sutan, Taher Marah 43
Suwarnabhumi, *kerajaan* 9, 10
Suwarnadwipa 4, 5
Syafei, M. 43, 282
Syarif, Peto *lihat* Bonjol, Tuanku Imam

T

Tajadi, *bukit* 36
takanai baragiah 76
Talang, *gunung* 105
talibun 237
Tambangan 35
Tambusai, Tuanku 36
Tan Tuah 58
Tanah Datar, *luhak* 20, 31, 33-5, 48, 105, 123
Tanca 14
Tandikat, *gunung* 34
Tang, Dinasti 25
Tanjung, *suku* 123, 124
Tanjung Barulak, *nagari* 31
tansa 278, 280
Tapanuli 35
Tarantang Gadang 34
taratak 9
Tarekat Canking 38
Tarekat Naksabandiyah 38-43
Tarekat Satariyah 27, 28, 39, 41
Tarekat Ulakan 38
Tarekat Wujudiyah 24, 28
telempong 269, 270, 272, 280
tembilang besi 159
tenggang raso 74
Ternate 22
Thaib, Jalaludin 43
Thawalib School 40

Tiang Bungkuk 51
Tidore 22
Tiku 23
Tilatang, *nagari* 33
titai takambang 147
Tribuanaraya Mauliawarmadewa *lihat* Aditiawarman
tuah kato 99
Tuan Kadi di Padang Ganting 57
tuduh 111
Tunggal, Khatib *lihat* Bandang, Dato Ri
tungganai 106, 131, 180, 224
Tuo, Tuanku nan 29, 31
tuo dusun 94
tuo kampung 106
Tupai Janjang 276
Turki Muda 42

U

Ulakan 23, 27, 28, 37
ulayat 151, 152
umbuak umbai 111
Ummayah, Dinasti 25
Undang-undang Delapan 109, 110
Undang-undang Dua Belas 109, 111, 112
Undang-undang Dua Puluh 89, 109
Undang-undang Luhak dan Rantau 89
urang ampek jinih 145, 146
urang awak 70
urang kurang 157
urang nan ampek 106
Usmaniyyah, Khalifah 30

V

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 22

W

Wahabi, *kaum* 30
Walmiki 4
warih bajawek 223
warih dijawek 144, 145
Waruyu, Tuan *lihat* Aditiawarman
Wijaya, Raden 11, 14, 15
Wisnu, Raja 8
Wiswarupakumara, Mahamenteri 11

Y

Yahya, Haji 39, 41, 42
Yakub, Ilyas 43

Z

Zulkarnaen, Iskandar 4, 18, 24, 46